



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

PENETAPAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025 – 2029



MAL PELAYANAN
PUBLIK

Jl. Pahlawan No. 01

Gedung Mal Pelayanan Publik Samarinda

www.dpmptsp.samarindakota.go.id

BerAKHLAK **#** bangga melayani bangsa
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



WALI KOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA
NOMOR 67 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KOTA SAMARINDA TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA SAMARINDA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 123 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Samarinda Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025- 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 Nomor 11);
9. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Samarinda Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2024 Nomor 53);
10. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2025 Nomor: 60);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Samarinda.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Samarinda.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Samarinda.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Pemangku Kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan kepala daerah.
9. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/ panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.
13. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
14. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah Kota untuk mencapai tujuan.
15. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
16. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
17. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/ sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
18. Indikator kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).
19. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
20. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.
21. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.
22. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan fungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.

Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2025 dan berakhir pada tahun 2029.
- (2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) berdasarkan pada RPJMD Tahun 2025-2029.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 memuat:
 - a. tujuan dan sasaran;
 - b. program, kegiatan, dan indikator kinerja;
 - c. pagu indikatif dan prakiraan pendanaan untuk batas waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah.
- (3) Sistematika Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. BAB I : Pendahuluan;
 - b. BAB II : Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah;
 - c. BAB III : Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan;
 - d. BAB IV : Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; dan
 - e. BAB V : Penutup

Pasal 4

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 terdiri dari Renstra Perangkat Daerah sebagai berikut:
 - a. Inspektorat Daerah Kota Samarinda;
 - b. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda;
 - c. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda;
 - d. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda;
 - e. Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda;
 - f. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda;
 - g. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda;
 - h. Dinas Kesehatan Kota Samarinda;
 - i. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda;
 - j. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Samarinda;
 - k. Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda;
 - l. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda;
 - m. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda;
 - n. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda;
 - o. Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda;
 - p. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda;

- q. Dinas Perdagangan Kota Samarinda;
- r. Dinas Perikanan Kota Samarinda;
- s. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda;
- t. Dinas Perhubungan Kota Samarinda;
- u. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda;
- v. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda;
- w. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Samarinda;
- x. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda;
- y. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Samarinda;
- z. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda;
- aa. Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda;
- bb. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda;
- cc. Sekretariat Daerah Kota Samarinda;
- dd. Sekretariat DPRD Kota Samarinda;
- ee. Kecamatan Loa Janan Ilir;
- ff. Kecamatan Samarinda Seberang;
- gg. Kecamatan Palaran;
- hh. Kecamatan Sungai Kunjang;
- ii. Kecamatan Samarinda Kota;
- jj. Kecamatan Samarinda Ulu;
- kk. Kecamatan Samarinda Ilir;
- ll. Kecamatan Samarinda Utara;
- mm. Kecamatan Sambutan; dan
- nn. Kecamatan Sungai Pinang.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap penyusunan kebijakan Renstra Perangkat Daerah mulai dari tahap penyusunan awal sampai dengan rancangan akhir.

BAB IV PERUBAHAN

Pasal 6

- (1) Perubahan Renstra Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila:
 - a. terdapat perubahan atas Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2025-2029;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - c. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- d. terjadi perubahan yang mendasar, mencakup antara lain terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional;
 - e. perubahan kebijakan dan strategi baik di tingkat nasional maupun di tingkat pemerintah Daerah yang tidak perlu merubah RPJMD;
- (2) Dalam rangka efektivitas, perubahan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku Renstra Perangkat Daerah kurang dari 3 (tiga) tahun.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 19 September 2025

WALI KOTA SAMARINDA,

ANDI HARUN





PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Pahlawan No. 01 RT. 34 Gedung Mal Pelayanan Publik 75123

Website : www.dpmpstpsamarindakota.go.id, email : dpmpstpsmd@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN **KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU** **KOTA SAMARINDA**

NOMOR : 800.1 / 047 / 100.20

TENTANG

PENETAPAN TIM PENYUSUNAN RECANA STRATEGIS (RENSTRA) PADA **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU** **KOTA SAMARINDA TAHUN 2026**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda Tahun 2025-2029 diperlukan suatu tim penyusun yang dapat bekerja secara efektif, efisien, dan terkoordinasi;
- b. Bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda Tahun 2025-2029.
- Mengingat : 1. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Samarinda Tahun 2025-2029;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENTANG TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SAMARINDA TAHUN 2025-2029.**
- PERTAMA : Membentuk Tim Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda Tahun 2025-2029 dengan Komposisi dan Personalia sebagai berikut :
1. Ketua : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda
 2. Wakil Ketua : Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda
 3. Sekretaris : Pejabat Fungsional Perencana Ahli Muda
 4. Anggota :
 1. Kepala Bidang Investasi
 2. Pejabat Fungsional Penanaman Modal Ahli Madya
 3. Pejabat Fungsional Perizinan Ahli Madya
 4. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 5. Erni Septriana Ramadhani, SE, MM
 6. Defitri, SE
 7. Utami Dewi, MA
 8. Jati Hanafi S.Sos

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab serta melaporkan hasilnya kepada Walikota Samarinda melalui Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda.
- KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini, akan segera diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 7 Februari 2025

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**





KATA PENGANTAR

Nomor : 800.1 / 3421 / 100.20

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang maha esa, atas segala limpahan rahmat dan karunia-nya, sehingga dapat menyelesaikan Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Samarinda Tahun 2025-2029.

Rencana Strategis DPMPTSP Kota Samarinda periode 2025-2029 merupakan acuan bagi DPMPTSP dalam menyelenggarakan pelayanan penanaman modal, pelayanan perizinan dan non perizinan untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Rencana Strategis DPMPTSP Kota Samarinda periode 2025-2029 juga merupakan upaya penyatuan persepsi dan komitmen diantara internal baik itu unsur pimpinan maupun staf tentunya harus dapat dicapai secara bersama-sama.

Berbagai kebijakan, program maupun kegiatan yang disusun dalam Rencana Strategis DPMPTSP Kota Samarinda Tahun 2025-2029 diharapkan dapat meningkatkan kinerja DPMPTSP Kota Samarinda sebagai penyelenggara pelayanan penanaman modal, pelayanan perizinan dan non perizinan serta koordinasi dengan instansi teknis.

Sebagai bentuk perencanaan jangka menengah tentunya Rencana Startegis DPMPTSP Kota Samarinda dalam perjalanannya akan dipengaruhi oleh berbagai faktor lingkungan yang bersifat tak terduga (*turbulence*). Untuk itu berbagai penyempurnaan baik program maupun kegiatan tentunya akan terus dilakukan yang disesuaikan dengan berbagai pengaruh tersebut baik pengaruh yang bersifat regulatif maupun bersifat konsekuensi yang harus dihadapi guna terus memaksimalkan berbagai produk perencanaan dengan kebutuhan nyata yang ada di masyarakat.

Akhirnya semoga Rencana Strategis DPMPTSP Kota Samarinda Tahun 2025-2029 ini dapat di implementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan terwujudnya good governance.



Samarinda, 30 Oktober 2025

Plt. Kepala DPMPTSP Kota Samarinda

Dr. RIDUANSAH, SE, M.Si

Pembina TK.I / IVb

NIP 19750421 200604 1 017



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GRAFIK	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	9
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah.....	9
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	23
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	28
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	31
BAB V PENUTUP	61
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Profil Sumber Daya Manusia DPMPTSP Kota Samarinda	11
Tabel 2.2	Jumlah Personel berdasarkan Eselon/Non Eselon	11
Tabel 2.3	Jumlah Sarana dan Prasarana Kerja	13
Tabel 2.4	Jenis Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	15
Tabel 2.5	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah DPMPTSP Kota Samarinda	20
Tabel 2.6	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah DPMPTSP Kota Samarinda Tahun 2020-2024	21
Tabel 2.1	Teknik Menyimpulkan Isu Strategis	17
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DPMPTSP Kota Samarinda Tahun 2025-2029	28
Tabel 3.2	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan	29
Tabel 3.3	Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra DPMPTSP Kota Samarinda	29
Tabel 3.4	Penetapan Renstra PD	30
Tabel 3.5	Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD	30
Tabel 4.1	Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Tahun 2025-2029 DPMPTSP Kota Samarinda	35
Tabel 4.2	Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra DPMPTSP Kota Samarinda	48
Tabel 4.3	Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	58
Tabel 4.4	Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah ..	59
Tabel 4.5	Indikator Kinerja Utama PD	59
Tabel 4.6	Indikator Kinerja Kunci PD	60
Tabel 4.7	Indikator Kinerja Daerah	60



DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1	Jumlah Personil DPMPTSP.....	10
Grafik 2.2	Jumlah Personil DPMPTSP Berdasarkan Eselon.....	12
Grafik 2.3	Jumlah Personil DPMPTSP Berdasarkan Golongan.....	12
Grafik 2.4	Jumlah Personil DPMPTSP Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	13



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi DPMPTSP Kota Samarinda	10
Gambar 2.2 Alur Pelayanan DPMPTSP Kota Samarinda	15



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia, Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diwajibkan untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra).

Perencanaan strategis adalah proses yang dilakukan untuk menentukan strategi atau arahan, serta pengambilan keputusan dalam mengalokasikan sumber daya yang dimiliki. Perencanaan strategis merupakan sebuah alat manajemen yang digunakan untuk mengelola kondisi saat ini, untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan, sehingga rencana strategis menghasilkan petunjuk yang dapat digunakan sebagai panduan yang berisikan uraian tentang kebijakan tujuan jangka panjang.

Renstra OPD mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada OPD dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD), sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran daerah. Kualitas dokumen Renstra sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Renstra OPD sangat ditentukan oleh kemampuan OPD dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi.

Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Samarinda Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 Tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi dari DPMPTSP Kota Samarinda yang berfokus pada penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perizinan dan penanaman modal daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis. Dokumen Renstra ini merupakan penjabaran dari rencana pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Samarinda tahun 2025-2029, dan mengacu pada Renstra



DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur serta Renstra Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM.

Berdasarkan Permendagri No. 86 Tahun 2017 pasal 109, penyusunan Renstra Perangkat Daerah mencakup analisis gambaran pelayanan, analisis permasalahan, penelaahan dokumen perencanaan lainnya, analisi isu strategis, perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah berdasarkan pada sasaran dan indikator serta target kinerja dalam RPJMD.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal;
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
8. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
9. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Kawasan Ekonomi Khusus;
10. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
11. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah;
12. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
13. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Provinsi Kalimantan Timur;
14. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 22 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
15. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;



16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRW Nasional;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
27. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
28. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana



- Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Nomenklatur DPMPTSP;
 33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 36. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 37. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023-2042;
 38. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026;
 39. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Urusan Pemerintahan Konkuren yang Menjadi Kewenangan Daerah;
 40. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 41. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2021-2026;
 42. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 43. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2021-2026;



44. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda Tahun 2023 – 2042
45. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Samarinda Tahun 2025-2045;
46. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2025-2029.
47. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 55 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda.
48. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 67 Tahun 2025 Tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Samarinda Tahun 2025-2029.

1.3 Maksud Dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda Tahun 2025 - 2029 untuk menyiapkan dokumen perencanaan sebagai pedoman/penuntun yang dapat memberikan gambaran kondisi yang akan dicapai, arah kebijakan, strategi yang diambil untuk mencapai sasaran dalam kerangka pencapaian visi dan misi, sebagai tolak ukur pertanggungjawaban Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda pada setiap akhir tahun dalam kurun waktu 5 tahun kedepan dalam upaya pengembangan investasi penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kota Samarinda.

Perubahan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda Tahun 2025 - 2029 bertujuan sebagai berikut:

1. Sebagai acuan dalam perencanaan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda Tahun 2025 - 2029, sehingga setiap tahapan perencanaan pembangunan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan.
2. Memberikan arahan kebutuhan program dan kegiatan prioritas yang jelas hingga pelaksanaan kegiatan bisa terwujud secara efektif, efisien dan optimal.
3. Memudahkan pemahaman seluruh jajaran Manajemen dan Aparatur dilingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda Tahun 2025-2029 dalam melaksanakan kegiatan secara terarah,



terpadu dan terukur untuk mencapai tujuan sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.

4. Sebagai instrumen tolak ukur dan kendali untuk mengevaluasi/penilaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda untuk masa periode tahun 2025 - 2029.
5. Sebagai dasar komitmen bersama seluruh jajaran aparatur di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda terhadap program-program yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dalam rangka mencapai visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih di Kota Samarinda.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda Tahun 2025 - 2029 sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan Rencana Pembangunan Daerah, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah.
- 1.2 Landasan Hukum memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.
- 1.3 Maksud dan Tujuan memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah
- 1.4 Sistematika Penulisan menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen



BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.
- 2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah memuat Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah. Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Kemudian memuat Penentuan Isu-isu Strategis, mereview faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari : Gambaran pelayanan Perangkat Daerah; Sasaran jangka menengah pada Renstra K/L; Sasaran jangka menengah dari Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota; Implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah; dan Implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah. Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Perangkat Daerah tahun rencana.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini memuat Tujuan dan Sasaran Resntra Perangkat Daerah., dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran rencana pembangunan daerah tahun 2025 – 2029 dan/atau Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai kewenangan



daerah. Kemudian memuat rumusan pernyataan strategi Perangkat Daerah dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran renstra Perangkat Daerah Tahun 2025- 2029.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini memuat uraian Program, uraian Kegiatan, uraian Sub Kegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target, dan Pagu Indikatif. Mengemukakan Uraian Sub Kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah, target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD melalui IKU PD, serta target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah melalui IKK.

BAB V PENUTUP



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Samarinda yaitu Menyusun dan Melaksanakan Kebijakan Daerah di Bidang Perizinan dan Penanaman Modal Daerah berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, DPMPTSP Kota Samarinda mempunyai fungsi sebagai berikut:

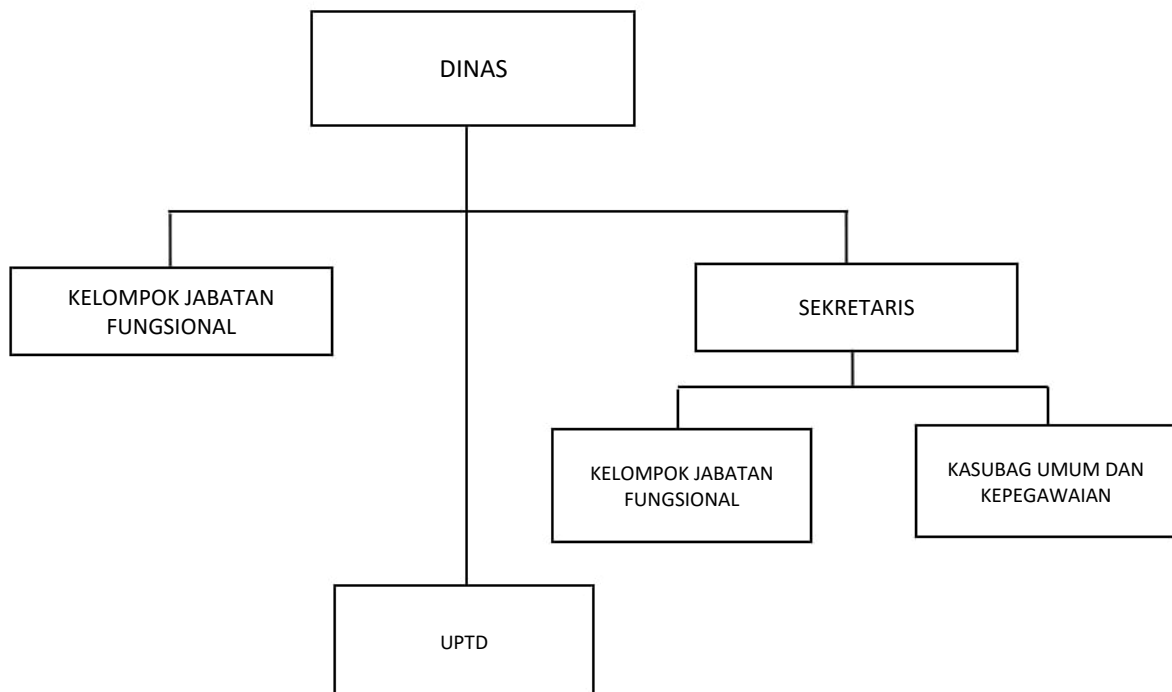
- a.) Penetapan kebijakan teknis bidang perijinan dan penanaman modal daerah sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah.
- b.) Perencanaan, pembinaan, pengkoordinasian kebijakan teknis bidang pengembangan energi sumber daya mineral dan promosi, pengkajian pengembangan potensi dan perencanaan kebijakan, pengembangan energi dan sumber daya mineral serta promosi dan pemberdayaan dunia usaha.
- c.) Perencanaan, pembinaan, pengkoordinasian kebijakan teknis bidang pelayanan perijinan dan nonperijinan, pelayanan perijinan, pelayanan perijinan tertentu dan nonperijinan serta pengolahan data, informasi dan fasilitas.
- d.) Perencanaan, pembinaan, pengkoordinasian dan pengendalian kebijakan teknis bidang pengendalian, pemantauan dan pembinaan serta penanganan pengaduan dan pengawasan.
- e.) Pembinaan penyelenggaraan urusan kesekretariatan dinas, dan
- f.) Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional.

Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda sesuai dengan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 55 Tahun 2024 terdiri dari :

- a) Dinas;
- b) Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
- c) Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- d) UPTD.

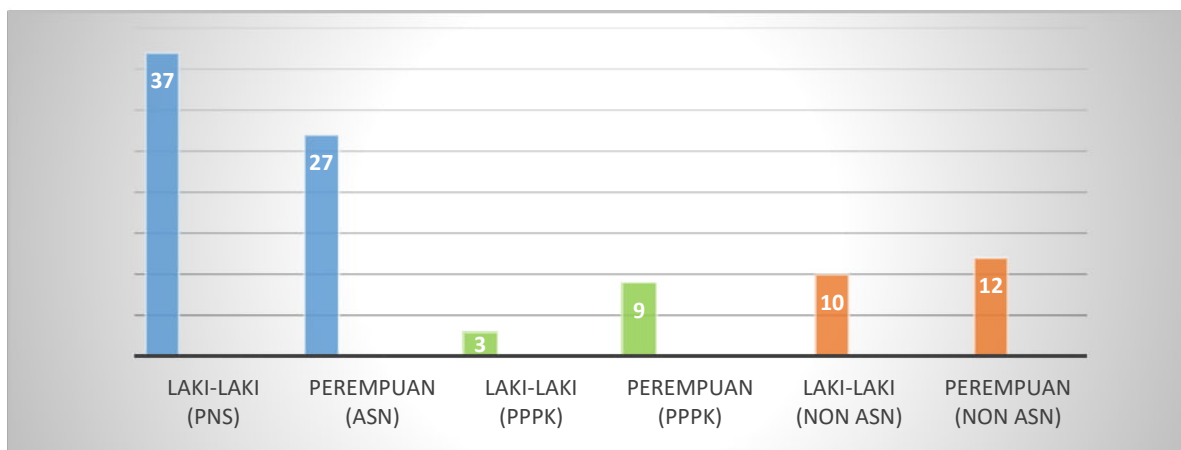
Gambar 2.1.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KOTA SAMARINDA**



Dalam Rangka menjalankan kegiatan administrasi dan operasionalnya, DPMPTSP Kota Samarinda sudah didukung oleh aparatur pelayanan penanaman modal dengan jumlah personil sebanyak 98 orang terdiri dari 64 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS), 12 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dan 22 Orang Non ASN dengan rincian sebagai berikut:

**Grafik 2.1
Jumlah personil DMPTSP**





Tabel 2.1
Profil Sumber Daya Manusia DPMPTSP Kota Samarinda

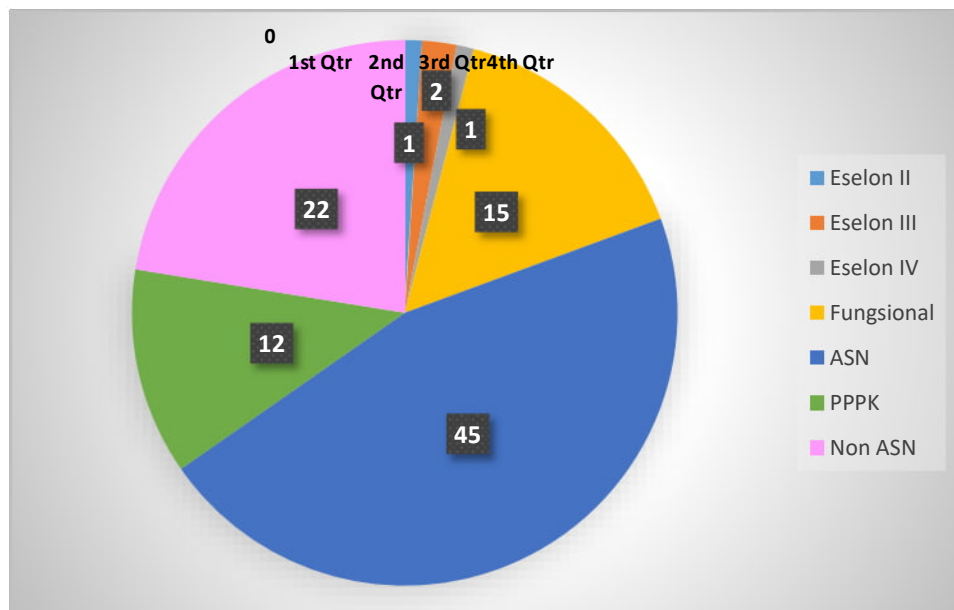
No.	JABATAN	ESELON				GOLONGAN				TINGKAT PENDIDIKAN				
		I	II	III	IV	IV	III	II	I	S3	S2	S1	D3/D2	SMA/SMK
1.	Kepala DPMPTSP		1			1						1		
2.	sekretaris			1		1				1				
	- Kasubag. Umum dan Kepegawaian				1		1				1			
	- Staff ASN					1	8	1			1	7	1	1
	- Non ASN										1	8		4
3.	Kepala Bidang Investasi			1			1					1		
	- Staff ASN						3	3				3		3
	- Non ASN											1		2
4.	Koordinator PM			1		1					1			
	- Staff ASN					1	2				1	2		
	- Non ASN											2		1
5.	Koordinator PTSP			2		2						1		
	- Staff ASN						18	6				11		12
	- Non ASN										2	9	2	9
6.	Jabatan Fungsional					5	10				6	9		

Tabel 2.2
Jumlah personil berdasarkan Eselon / Non Eselon

No.	Eselon / Non Eselon	Jabatan	Jumlah
1.	Eselon II	Kepala Dinas	1 Orang
2.	Eselon III	Sekretaris	1 Orang
3.	Eselon III	Kepala Bidang	1 Orang
5.	Eselon IV	Kasubbag Umum	1 Orang
6.	Fungsional	Jabatan Fungsional	15 Orang
7.	Non Eselon	Staf	57 Orang
8.	Non ASN	Staf	22 Orang
Jumlah Keseluruhan			98 Orang

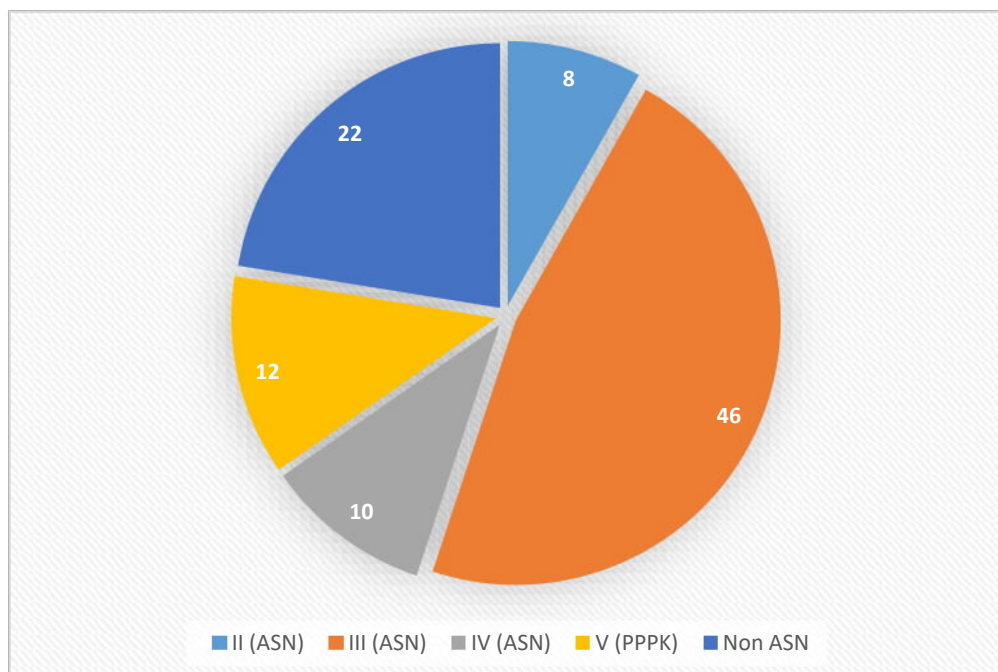
Grafik 2.2

Jumlah Personil DPMPTSP Berdasarkan Eselon.



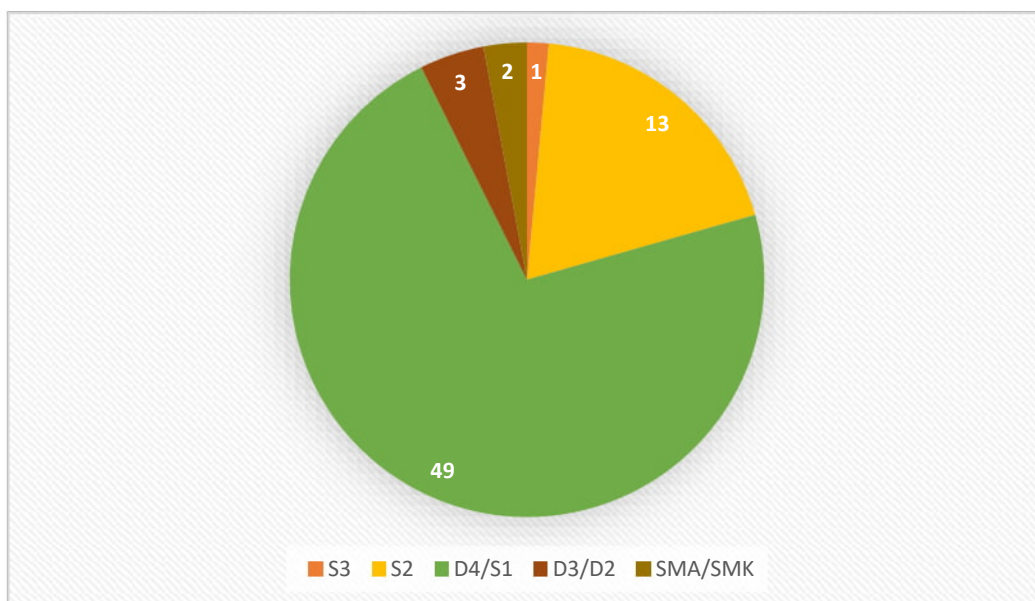
Grafik 2.3

Jumlah personil Berdasarkan Golongan



Grafik 2.4

Jumlah personil Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Untuk mendukung pelaksanaan kinerja, DPMPTSP Kota Samarinda memiliki sarana dan prasarana sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.3

Jumlah Sarana dan Prasarana Penunjang Pelayanan

No	Nama Barang	Satuan	Jumlah
1	Air Conditioner	Unit	10
2	Mesin Penghacur Kertas	Unit	4
3	Alat peraga (Neon Box & Pigura)	Unit	3
4	Alat Ukur	Unit	19
5	Audio visual Logitech	Unit	1
6	Bangunan Gedung Kantor	Unit	2
7	Board Display	Unit	4
8	Brankas	Unit	3
9	Camera video, digital, film	Unit	5
10	Caption Generator	unit	1
11	Computer Compatible	Unit	27
12	CPU	Unit	29
13	Facsimile	Unit	1
14	Kursi kerja	Unit	129
15	Meja kerja	Unit	106
16	Laptop	Unit	22
17	LCD Projector/Infocus	Unit	1



18	Lemari besi dan Kayu	Unit	100
19	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	Unit	21
20	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Unit	128
21	Mesin Absensi	Unit	1
22	Mesin Fotocopy Folio Canon / iR 2420L	Unit	1
23	Monitor	Unit	10
24	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Unit	18
25	Kendaraan Operasional Roda 4	Unit	5
26	Kendaraan Operasional Roda 2	Unit	4
27	ServerASUS / RS520-E9/RS8	Unit	1
28	Wheel Chair (Alat Kesehatan Rehabilitasi	Unit	1
29	Uninterruptible Power Supply (UPS)	Unit	46
30	Router (MIKROTIK / ROUTERBOARD)	Unit	3
31	Server ZOAN ST160-R521	Unit	1
32	CCTV	Unit	32

Secara umum, untuk saat ini Sumber Daya Aset yang dimiliki oleh DPMPTSP Kota Samarinda, sudah memadai dan memenuhi Standar Pelayanan Publik untuk pelayanan penanaman modal dan pelayanan perizinan.

Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda merupakan Organisasi Perangkat Daerah penyelenggara Pelayanan Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara terpadu dengan komitmen memberikan Pelayanan Prima sesuai dengan moto layanan “CERIA” yaitu Cepat, Efektif, Ramah, Inovatif, dan Amanah.

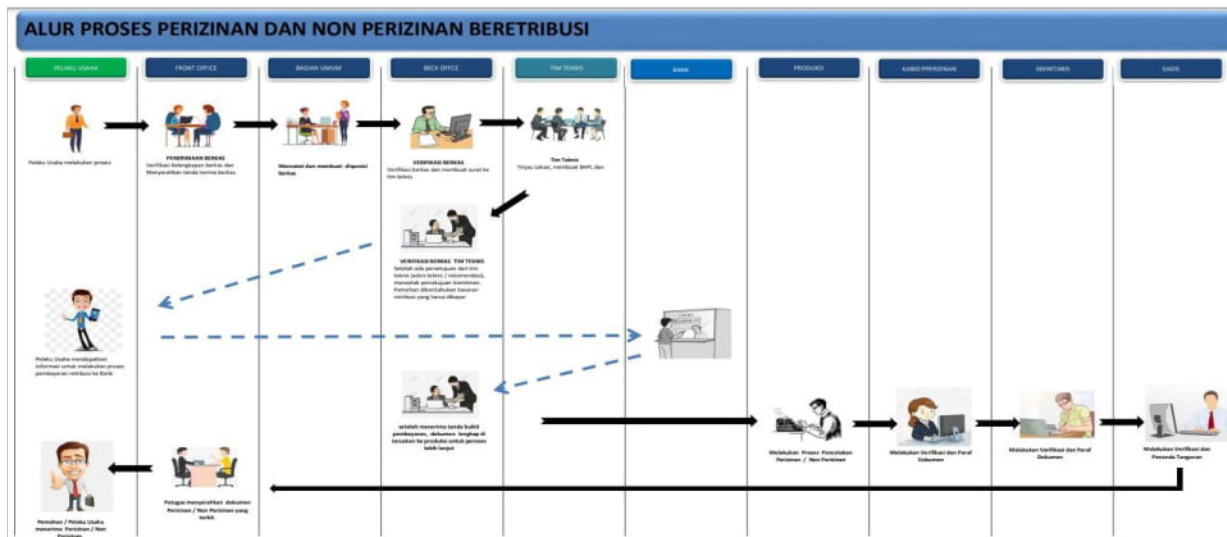
Sesuai ketentuan Pasal 15, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, disebutkan bahwa DPMPTSP wajib menerapkan manajemen PTSP dalam menyelenggarakan pelayanan perizinan dan non perizinan. Manajemen PTSP dimaksud meliputi : a) pelaksanaan pelayanan; b) pengelolaan pengaduan masyarakat; c) pengelolaan informasi; d) pengawasan internal; e) penyuluhan kepada masyarakat; dan f) pelayanan konsultasi.

Penyelenggaraan PTSP oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda, secara administratif dilaksanakan oleh Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, yang dilaksanakan dengan menggunakan prinsip keterpaduan atau sinergitas, ekonomi, akuntabilitas. Sedangkan substansi teknis penyelenggaraan PTSP menjadi kewenangan dan tanggungjawab masing-masing perangkat daerah. Tim teknis PTSP terdiri dari perangkat Dinas Teknis yang memiliki kompetensi dan integritas yang

ditetapkan sesuai dengan surat keputusan Walikota Samarinda nomor : 640-05/473/HK-KS/XII/2017 yang merujuk tentang pembentukan tim teknis di DPMPTSP.

Gambar 2.2

Alur Pelayanan DPMPTSP Kota Samarinda



Dalam Peraturan Walikota Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 33 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan. Berdasarkan perwali ini terbagi 2 yakni Perizinan yang jadi kewenangan KOTA di OSS dan Perizinan yang jadi kewenangan KOTA yang ada diaplikasi SIPO diluar OSS yang telah dilimpahkan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda oleh SKPD Teknis. Berikut tabel data 7 sektor perizinan dan non perizinan perizinan dan non perizinan yang diselenggarakan melalui aplikasi SIPO :

Tabel 2.4

Jenis Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan

Klasifikasi dan jenis Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada DPMPTSP Kota Samarinda, terdiri dari :

A. SEKTOR PUPR

No.	Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
				Parameter	Bupati/Walikota
1.	Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)	5 hari kerja (berkas lengkap)	Selama tidak ada perubahan	Wilayah Kota Samarinda	Walikota Samarinda
2.	Izin Membuka Tanah Negara (IMTN)	7 hari kerja (berkas lengkap)	3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali	Wilayah Kota Samarinda	Walikota Samarinda
3.	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Kegiatan Non Berusaha	7 hari kerja (berkas lengkap)	Selama tidak ada perubahan	Wilayah Kota Samarinda	Walikota Samarinda



B. SEKTOR PERDAGANGAN

No.	Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
				Parameter	Bupati/Walikota
1.	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	5 hari kerja (berkas lengkap)	Selama tidak ada perubahan pada kegiatan usaha	Wilayah Kota Samarinda	Walikota Samarinda
2.	Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	7 hari kerja (berkas lengkap)	1 (satu) tahun	Wilayah Kota Samarinda	Walikota Samarinda

C. SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP

No.	Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
				Parameter	Bupati/Walikota
1.	Persetujuan Lingkungan Non OSS	7 hari kerja (berkas lengkap)	Selama tidak ada perubahan (Sesuai dengan jenis reklame pemohon)	Wilayah Kota Samarinda	Walikota Samarinda

D. SEKTOR KOMUNIKASI DAN INFORMASI

No.	Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
				Parameter	Bupati/Walikota
1.	Izin Reklame	5 hari kerja (berkas lengkap)	Selama tidak ada perubahan	Wilayah Kota Samarinda	Walikota Samarinda

E. SEKTOR KESEHATAN

No.	Perizinan Berusaha	KELOMPOK	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
					Parameter	Bupati/Walikota
1.	Dokter	Tenaga Medis	7 hari kerja (berkas Lengkap)	5 (lima) Tahun	Wilayah Kota Samarinda	Walikota Samarinda
2.	Dokter Gigi	Tenaga Medis	7 hari kerja (berkas Lengkap)	5 (lima) Tahun	Wilayah Kota Samarinda	Walikota Samarinda
3.	Dokter Spesialis	Tenaga Medis	7 hari kerja (berkas Lengkap)	5 (lima) Tahun	Wilayah Kota Samarinda	Walikota Samarinda
4.	Dokter Gigi Spesialis	Tenaga Medis	7 hari kerja (berkas Lengkap)	5 (lima) Tahun	Wilayah Kota Samarinda	Walikota Samarinda
5.	Psikologi Klinis	Tenaga Psikologi Klinis	7 hari kerja (berkas Lengkap)	5 (lima) Tahun	Wilayah Kota Samarinda	Walikota Samarinda
6.	Perawat	Tenaga Keperawatan	7 hari kerja (berkas Lengkap)	5 (lima) Tahun	Wilayah Kota Samarinda	Walikota Samarinda
7.	Bidan	Tenaga Kebidanan	7 hari kerja (berkas Lengkap)	5 (lima) Tahun	Wilayah Kota Samarinda	Walikota Samarinda
8.	Apoteker	Tenaga Kefarmasian	7 hari kerja (berkas Lengkap)	5 (lima) Tahun	Wilayah Kota Samarinda	Walikota Samarinda
9.	Tenaga Teknis Kefarmasian	Tenaga Kefarmasian	7 hari kerja (berkas Lengkap)	5 (lima) Tahun	Wilayah Kota Samarinda	Walikota Samarinda
10.	Terapis Gigi Dan Mulut	Tenaga Keteknisian Medis	7 hari kerja (berkas Lengkap)	5 (lima) Tahun	Wilayah Kota Samarinda	Walikota Samarinda
11.	Refraksionis Optisien/Optometrists	Tenaga Keteknisian Medis	7 hari kerja (berkas Lengkap)	5 (lima) Tahun	Wilayah Kota Samarinda	Walikota Samarinda
12.	Perekaman Medis dan Informasi Kesehatan	Tenaga Keteknisian Medis	7 hari kerja (berkas Lengkap)	5 (lima) Tahun	Wilayah Kota Samarinda	Walikota Samarinda
13.	Penata Anestesi	Tenaga Keteknisian Medis	7 hari kerja (berkas Lengkap)	5 (lima) Tahun	Wilayah Kota Samarinda	Walikota Samarinda



14.	Audiologis	Tenaga Keteknisian Medis	7 hari kerja (berkas Lengkap)	5 (lima) Tahun	Wilayah Kota Samarinda	Walikota Samarinda
15.	Teknis Gigi	Tenaga Keteknisian Medis	7 hari kerja (berkas Lengkap)	5 (lima) Tahun	Wilayah Kota Samarinda	Walikota Samarinda
16.	Teknik Kardiovaskuler	Tenaga Keteknisian Medis	7 hari kerja (berkas Lengkap)	5 (lima) Tahun	Wilayah Kota Samarinda	Walikota Samarinda
17.	Teknis Pelayanan Darah	Tenaga Keteknisian Medis	7 hari kerja (berkas Lengkap)	5 (lima) Tahun	Wilayah Kota Samarinda	Walikota Samarinda
18.	Fisioterapis	Tenaga Keterampilan Fisik	7 hari kerja (berkas Lengkap)	5 (lima) Tahun	Wilayah Kota Samarinda	Walikota Samarinda
19.	Terapis Wicara	Tenaga Keterampilan Fisik	7 hari kerja (berkas Lengkap)	5 (lima) Tahun	Wilayah Kota Samarinda	Walikota Samarinda
20.	Okupasi Terapis	Tenaga Keterampilan Fisik	7 hari kerja (berkas Lengkap)	5 (lima) Tahun	Wilayah Kota Samarinda	Walikota Samarinda
21.	Akupuntur	Tenaga Keterampilan Fisik	7 hari kerja (berkas Lengkap)	5 (lima) Tahun	Wilayah Kota Samarinda	Walikota Samarinda
22.	Ahli Teknologi Laboratorium Medik	Tenaga Teknik Biomedika	7 hari kerja (berkas Lengkap)	5 (lima) Tahun	Wilayah Kota Samarinda	Walikota Samarinda
23.	Radiografer	Tenaga Teknik Biomedika	7 hari kerja (berkas Lengkap)	5 (lima) Tahun	Wilayah Kota Samarinda	Walikota Samarinda
24.	Elektromedis	Tenaga Teknik Biomedika	7 hari kerja (berkas Lengkap)	5 (lima) Tahun	Wilayah Kota Samarinda	Walikota Samarinda
25.	Fisikawan Medik	Tenaga Teknik Biomedika	7 hari kerja (berkas Lengkap)	5 (lima) Tahun	Wilayah Kota Samarinda	Walikota Samarinda
26.	Tenaga Ortotik Postetik	Tenaga Teknik Biomedika	7 hari kerja (berkas Lengkap)	5 (lima) Tahun	Wilayah Kota Samarinda	Walikota Samarinda
27.	Radioterapis	Tenaga Teknik Biomedika	7 hari kerja (berkas Lengkap)	5 (lima) Tahun	Wilayah Kota Samarinda	Walikota Samarinda
28.	Tenaga Sanitasi Lingkungan/Sanitarian	Tenaga Kesehatan Lingkungan	7 hari kerja (berkas Lengkap)	5 (lima) Tahun	Wilayah Kota Samarinda	Walikota Samarinda
29.	Entomolog Kesehatan	Tenaga Kesehatan Lingkungan	7 hari kerja (berkas Lengkap)	5 (lima) Tahun	Wilayah Kota Samarinda	Walikota Samarinda
30.	Mikrobiolog Kesehatan	Tenaga Kesehatan Lingkungan	7 hari kerja (berkas Lengkap)	5 (lima) Tahun	Wilayah Kota Samarinda	Walikota Samarinda
31.	Nutrisi/Tenaga Gizi	Tenaga Gizi	7 hari kerja (berkas Lengkap)	5 (lima) Tahun	Wilayah Kota Samarinda	Walikota Samarinda
32.	Dietsien	Tenaga Gizi	7 hari kerja (berkas Lengkap)	5 (lima) Tahun	Wilayah Kota Samarinda	Walikota Samarinda
33.	Epidemiolog Kesehatan	Tenaga Kesehatan Masyarakat	7 hari kerja (berkas Lengkap)	5 (lima) Tahun	Wilayah Kota Samarinda	Walikota Samarinda
34.	Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku	Tenaga Kesehatan Masyarakat	7 hari kerja (berkas Lengkap)	5 (lima) Tahun	Wilayah Kota Samarinda	Walikota Samarinda
35.	Pembimbing Kesehatan Kerja	Tenaga Kesehatan Masyarakat	7 hari kerja (berkas Lengkap)	5 (lima) Tahun	Wilayah Kota Samarinda	Walikota Samarinda
36.	Tenaga Administrasi & Kebijakan Kesehatan	Tenaga Kesehatan Masyarakat	7 hari kerja (berkas Lengkap)	5 (lima) Tahun	Wilayah Kota Samarinda	Walikota Samarinda
37.	Tenaga Biostatistik dan Kependudukan	Tenaga Kesehatan Masyarakat	7 hari kerja (berkas Lengkap)	5 (lima) Tahun	Wilayah Kota Samarinda	Walikota Samarinda
38.	Tenaga Kesehatan Reproduksi Dan Keluarga	Tenaga Kesehatan Masyarakat	7 hari kerja (berkas Lengkap)	5 (lima) Tahun	Wilayah Kota Samarinda	Walikota Samarinda
39.	Tenaga Kesehatan Tradisional Ramuan	Tenaga Kesehatan Tradisional	7 hari kerja (berkas Lengkap)	5 (lima) Tahun	Wilayah Kota Samarinda	Walikota Samarinda
40.	Tenaga Kesehatan Tradisional Keterampilan	Tenaga Kesehatan Tradisional	7 hari kerja (berkas Lengkap)	5 (lima) Tahun	Wilayah Kota Samarinda	Walikota Samarinda
41.	Tenaga Kesehatan Lainnya	Ditetapkan Oleh Menteri	7 hari kerja (berkas Lengkap)	5 (lima) Tahun	Wilayah Kota Samarinda	Walikota Samarinda



F. SEKTOR PENDIDIKAN

No.	Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
				Parameter	Bupati / Walikota
1.	Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan Sekolah TK, SD, SMP Negeri dan Swasta	7 hari kerja (berkas lengkap)	Selama tidak ada perubahan	Wilayah Kota Samarinda	Walikota Samarinda
2.	Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal Lembaga Kursus dan Pelatihan / LKP	7 hari kerja (berkas lengkap)	2 (dua) Tahun	Wilayah Kota Samarinda	Walikota Samarinda
3.	Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat / PKBM	7 hari kerja (berkas lengkap)	2 (dua) Tahun	Wilayah Kota Samarinda	Walikota Samarinda
4.	Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal Pendidikan Anak Usia Dini / PAUD	7 hari kerja (berkas lengkap)	2 (dua) Tahun	Wilayah Kota Samarinda	Walikota Samarinda

G. SEKTOR SOSIAL

No.	Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
				Parameter	Bupati / Walikota
1.	Izin Pengumpulan Uang atau Barang dalam Wilayah Kota Samarinda	7 hari kerja (berkas lengkap)	1 (satu) tahun	Wilayah Kota Samarinda	Walikota Samarinda
2.	Izin Operasional Lembaga Kesejahteraan Sosial	7 hari kerja (berkas lengkap)	1 (satu) tahun	Wilayah Kota Samarinda	Walikota Samarinda

Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PP 5/2021) yang menjadi peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja membawa perubahan terhadap pengaturan perizinan berusaha. Sebelumnya, izin usaha dimohonkan melalui sistem perizinan berusaha berbasis elektronik, yakni online single submission (OSS) versi 1.1. Namun sejak 2 Juli 2021, permohonan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik dilakukan melalui sistem OSS-RBA sesuai dengan Surat Menteri Investasi /Kepala BKPM Nomor 1342/A.1/2021.

Online single submission risked based approach (OSS-RBA) adalah sistem perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik. Sistem OSS ini dikelola dan diselenggarakan oleh lembaga OSS dalam hal penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko (Pasal 1 angka 21 PP 5/2021).

Permohonan perizinan berusaha melalui sistem OSS ini telah diselenggarakan sejak tahun 2018. OSS mengintegrasikan seluruh pelayanan perizinan berusaha supaya tercipta standarisasi birokrasi perizinan di tingkat pusat dan daerah sehingga menciptakan pelayanan perizinan berusaha yang mudah, cepat dan terintegrasi. Tingkat Risiko Usaha Dalam OSS-RBA, perizinan usaha dikelompokkan berdasarkan tingkat risiko usahanya.



Risiko usaha ini dibagi menjadi 4 tingkatan, diantaranya (Pasal 10 ayat (1) dan (2) PP 5/2021)

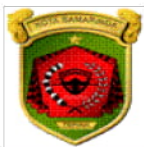
- ❖ Kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah;
- ❖ Kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah rendah;
- ❖ Kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi;
- ❖ Kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi.

Layanan OSS-RBA yang dilaksanakan di DPMPTSP Kota Samarinda sejak di resmikan/ diluncurkan oleh Presiden RI pada tanggal 9 Agustus 2021.

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik, baik yang memberikan pelayanan kepada masyarakat secara langsung maupun tidak langsung wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan untuk setiap jenis pelayanan sebagai tolok ukur dalam penyelenggaraan pelayanan di lingkungan masing-masing dan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan dinyatakan bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun, menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan.

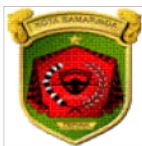
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda telah menetapkan Standar Pelayanan mengacu pada ketentuan tersebut diatas. Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda sesuai Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 51 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda, yang ditetapkan Tanggal 30 September 2022.

Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) terinci pada tabel dibawah ini:



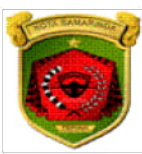
Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah DPMPTSP
Kota Samarinda

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian pada Tahun ke				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.	Nilai Realisasi Investasi	-	-	-	10 T	950 M	1 T	2.1 T	3 T	930 M	835 M	1.7 T	3.2 T	3.1 T	9,3	87,89	170	152	103
2.	Jumlah Regulasi yang Mendukung Investasi	-	-	-	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	100
3.	Jumlah Investor	-	-	-	125	150	175	200	225	225	250	31	5	1169	180	166	17	2.5	519
4.	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	-	-	-	89,5	90	90,5	91	91,5	88,2	88,7	89,6	86,1	92,8	98,5	98,5	98,9	94,6	101,48
5.	Jumlah Pelaku Usaha yang Melaporkan LKPM	-	-	-	300	300	300	300	400	300	300	300	300	400	100	100	100	100	100
6.	Jumlah Pengguna Layanan Data	-	-	-	3800	3900	4000	4100	4200	3800	3900	4000	4100	4200	100	100	100	100	100
7.	Nilai IKM	-	-	-	80	82.5	85	87.5	88	79.2	81.3	84.4	86.1	92.8	99	98,5	99,2	98,4	111,8



Tabel 2.6
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah DPMPTSP
Kota Samarinda Tahun 2020-2024

Uraian	Anggaran pada Tahun ke -					Realisasi Anggaran pada Tahun ke -					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke -					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	400.000.000	250.000.000	64.990.000	1.150.000.000	1.079.258.000	247.791.000	223.633.500	64.626.800	1.063.202.658	866.642.408	61,95	89,45	99,44	92,45	80,30	362,84	361,57
Program Promosi Penanaman Modal	884.000.000	778.280.000	451.289.000	700.000.000	928.908.500	823.784.533	708.662.211	397.584.400	628.352.913	893.962.827	93,19	91,05	88,10	89,76	96,24	8,46	10,60
Program Pelayanan Penanaman Modal	700.000.000	449.860.000	172.992.900	550.000.000	743.584.320	683.649.910	408.808.361	165.780.145	452.176.649	609.635.361	97,66	90,87	95,83	82,21	81,99	38,94	26,96
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	350.000.000	633.881.000	422.454.500	623.400.000	700.019.000	256.252.547	449.890.074	393.524.500	531.809.765	605.649.991	73,22	70,97	93,15	85,31	86,52	26,88	28,03
Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	535.000.000	480.175.000	507.756.500	685.706.000	508.446.000	530.617.000	444.939.525	496.238.850	625.249.446	502.689.870	99,18	92,66	97,73	91,18	98,87	1,17	0,45
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	2.892.190.400	18.452.134.215	21.731.277.282	28.451.947.539	17.814.236.314	2.575.596.225	15.226.839.078	18.097.584.584	23.444.660.556	16.709.971.270	89,05	82,52	83,28	82,40	93,80	137,41	127,60



Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Analisis Lingkungan Internal

Dari hasil observasi terhadap lingkungan internal Pemerintah Kota Samarinda, diperoleh suatu gambaran kondisi tentang kekuatan maupun kelemahan, sebagaimana dijelaskan berikut ini.

a) Kekuatan (Strengths)

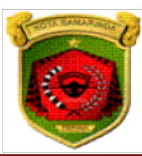
1. Lokasi Kota Samarinda yang strategis sebagai Ibu Kota Provinsi Kalimantan Timur memiliki posisi geografis yang mendukung investasi, terutama di sektor perdagangan dan Jasa.
2. Adanya Komitmen dan dukungan yang kuat dari Pemerintah Kota Samarinda dalam mempermudah Investasi.
3. Adanya Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang terintegrasi dengan Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik sehingga memudahkan Proses Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dengan sistem yang terpusat dan efisien bagi Pelaku Usaha.
4. Pemanfaatan Teknologi Informasi dengan dukungan Sistem Online seperti OSS (Online Single Submission) untuk meningkatkan transparansi dan aksesibilitas.

b) Kelemahan (Weakness)

1. Masih lemahnya koordinasi dengan OPD Teknis Terkait dan adanya tumpang tindih kewenangan terkait Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.
2. Sarana dan Prasarana, Fasilitas dan Sistem Teknologi Informasi yang belum sepenuhnya optimal di semua lini pelayanan.
3. Masih Kurangnya Pemahaman Masyarakat dan Pelaku Usaha terkait Laporan Kegiatan Penanaman Modal dan prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara online.
4. Regulasi/Kebijakan Pusat yang berubah-ubah dan tumpang tindih sehingga sulit untuk menyesuaikan dan beradaptasi dengan situasi dan kondisi di Kota Samarinda.

Analisis Lingkungan Eksternal

Dari hasil observasi terhadap lingkungan Eksternal Pemerintah Kota Samarinda pada umumnya, diperoleh suatu gambaran kondisi tentang peluang maupun tantangan, sebagaimana dijelaskan berikut ini.



a) Peluang (Opportunities)

1. Kota Samarinda sebagai salah satu dari tiga Kota Penyangga Ibu Kota Negara (IKN) membuka peluang besar untuk investasi baru di berbagai sektor.
2. Penerapan Jaringan komunikasi dan teknologi informasi semakin meluas dan berperan dalam dunia e-commerce dan bisnis investasi;
3. Peluang kemitraan untuk menjalin kerjasama dengan pihak swasta untuk menarik minat investor terhadap sektor-sektor infrastruktur, properti dan pariwisata.
4. Situasi keamanan dan ketertiban Kota Samarinda yang kondusif.

b) Tantangan (Threats)

1. Adanya Persaingan Antar Daerah lain di Kalimantan yang berlomba untuk menarik minat Investor, sehingga harus terus meningkatkan daya saing.
2. Perubahan Regulasi/kebijakan pusat dan daerah yang berubah-ubah dapat mempengaruhi iklim investasi.
3. Pelayanan Berbasis Digital rentan terhadap serangan siber jika tidak dilengkapi sistem keamanan yang memadai.
4. Kondisi Ekonomi Global yang mengalami Resesi atau krisis ekonomi dapat mengurangi minat investor.

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

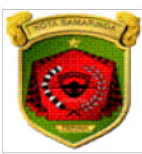
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Adapun permasalahan yang dihadapi oleh DPMPTSP Kota Samarinda adalah sebagai berikut:

- Masih rendahnya minat Investor untuk Berinvestasi di Kota Samarinda

Telaahan Visi, Misi Dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang sesuai dengan amanat UUD 1945, maka Pemerintah Daerah diharapkan dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, sebagai upaya untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan



memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Adapun Visi Walikota dan Wakil Walikota sebagai Kepala Daerah Terpilih dalam Pembangunan Kota Samarinda Tahun 2025 - 2029 adalah :

“ SAMARINDA MAJU UNTUK KALTIM MAJU ”

Dalam mewujudkan visi tersebut, akan ditempuh melalui 5 (lima) Misi Pembangunan Kota Samarinda Tahun 2025 - 2029, Yaitu :

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang unggul, berbudaya, dan berdaya saing;
2. Mewujudkan Ekonomi Samarinda Inklusif, Mandiri, dan berkelanjutan;
3. Mewujudkan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan;
4. Mewujudkan Samarinda layak huni melalui stabilitas kamtibmas, ketahanan sosial dan ekologis.
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, berketahanan, dan adaptif yang integritas dan akuntabel

Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi

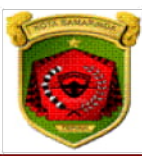
A. Telaahan Renstra Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

Berdasarkan amanat peraturan dan undang – undang terhadap tugas dan fungsi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/ (BKPM), visi BKPM adalah sebagai berikut :

“Mewujudkan Indonesia sebagai Negara Tujuan Investasi yang Unggul dan Berdaya Saing Melalui Percepatan Investasi dan Hilirisasi yang Berkelanjutan Guna Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Pemerataan Pembangunan.”

Sedangkan Misi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM adalah :

1. Meningkatkan iklim investasi yang kondusif, transparan, dan kompetitif melalui penyederhanaan regulasi, perizinan, serta pemberian insentif yang tepat sasaran.
2. Mendorong percepatan hilirisasi sumber daya alam dan industri strategis nasional guna meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk dalam negeri.
3. Mengoptimalkan promosi investasi terintegrasi di tingkat nasional dan internasional dengan memanfaatkan potensi wilayah dan sektor unggulan Indonesia.



4. Memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan pelaku usaha dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan proyek investasi serta program hilirisasi.
5. Meningkatkan kualitas pelayanan investasi yang berbasis digital dan data melalui reformasi sistem pelayanan terpadu dan pemanfaatan teknologi informasi.
6. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat melalui penyebaran investasi yang inklusif, berkelanjutan, dan berbasis potensi lokal.

B. Telahaan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur

Adapun Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2025-2029 adalah :

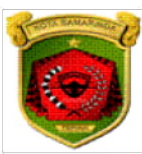
“Kaltim Sukses Menuju Generasi Emas”

Dalam rangka mewujudkan visi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur 2025-2029, ditetapkan misi pembangunan dalam lima tahun mendatang yaitu:

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang unggul dan sejahtera;
2. Mewujudkan Kalimantan Timur sebagai pusat ekonomi baru yang inklusif berbasis industrialisasi komoditas unggulan daerah;
3. Meningkatkan pembangunan infrastruktur guna menunjang kegiatan perekonomian, pelayanan publik, dan kesehatan;
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, profesional, dan berintegritas berbasis teknologi informasi;
5. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama, penguatan budaya, dan kearifan lokal; dan
6. Mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

Sejalan dengan Misi Ke-4, DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur diwujudkan melalui:

1. Peningkatan kualitas pelayanan investasi dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk menciptakan sistem perizinan yang transparan dan efisien.;
2. Penguatan kapasitas sumber daya manusia agar mampu memberikan pelayanan yang profesional dan berintegritas kepada para investor dan pelaku usaha;
3. Sinergi dengan instansi terkait untuk menciptakan ekosistem investasi yang kondusif dan berdaya saing tinggi;



4. Pengembangan kebijakan pro-investasi yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dan pemerataan pembangunan;

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pemerintah Kota Samarinda telah menetapkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2023 tentang RTRW Kota Samarinda untuk periode 2023–2043. Dokumen ini menjadi dasar hukum dan acuan dalam penataan ruang kota, mencakup struktur ruang, pola ruang, kawasan strategis, serta arahan pemanfaatan ruang yang berkelanjutan.

Penetapan RTRW ini bertujuan untuk mengarahkan pembangunan kota secara terintegrasi dan berkelanjutan, serta mendukung sinkronisasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029. Hal ini penting agar kebijakan pembangunan sejalan dengan prinsip ekonomi berkelanjutan dan pengelolaan lingkungan yang baik.

Sebagai bagian dari penyusunan RPJMD 2025–2029, Pemerintah Kota Samarinda melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) telah memulai proses penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). KLHS merupakan analisis sistematis dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan terintegrasi dalam setiap kebijakan, rencana, dan program pembangunan daerah.

Proses penyusunan KLHS melibatkan identifikasi isu-isu strategis lingkungan, seperti pengelolaan banjir, perlindungan kawasan lindung, dan pengendalian pencemaran. Konsultasi publik juga telah dilakukan untuk mengumpulkan masukan dari berbagai pemangku kepentingan guna memperkaya analisis dan rekomendasi dalam KLHS.

Kota Samarinda sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Timur memiliki peran strategis dalam pertumbuhan ekonomi, sosial, dan lingkungan. RTRW dan KLHS merupakan instrumen penting untuk memastikan pembangunan berkelanjutan, mengoptimalkan tata ruang, dan meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. RTRW dan KLHS Kota Samarinda perlu diperkuat dengan pendekatan berbasis risiko lingkungan dan inklusivitas. Pembangunan infrastruktur dan ekonomi harus sejalan dengan daya dukung ekosistem untuk menjamin keberlanjutan jangka panjang.

Penentuan Isu-Isu Strategis

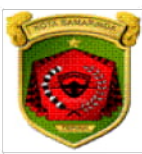
Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaahan dari beberapa dokumen perencanaan lainnya, Isu strategis jangka menengah DPMPTSP Kota Samarinda adalah sebagai berikut:

1. Iklim Investasi yang Kondusif;



Tabel 2.1 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis PD

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Investasi Sektor Perdagangan, dan Jasa, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif	Masih rendahnya Minat Investor untuk Berinvestasi di Kota Samarinda	Sinkronisasi Peta Potensi Investasi dengan Perencanaan Tata Ruang	Perubahan Iklim dan tren Investasi	Transisi Energi, dan Hilirisasi SDA	Investasi yang mendukung Ekonomi Mandiri dan Berkelanjutan	Iklim Investasi yang kondusif



BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Dalam mewujudkan Visi melalui pelaksanaan Misi yang telah ditetapkan tersebut diatas, maka perlu adanya kerangka yang jelas pada setiap misi menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Perumusan tujuan dan sasaran DPMPTSP Kota Samarinda Tahun 2025-2029 dikelompokkan berdasarkan Misi yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

Tujuan jangka menengah DPMPTSP Kota Samarinda tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Meningkatkan Investasi Daerah;

Sedangkan Sasaran dari Tujuan Jangka Menengah yaitu :

1. Meningkatkan Capaian Investasi;

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah DPMPTSP Kota Samarinda kinerjanya disajikan pada Tabel berikut ini :

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DPMPTSP Kota Samarinda tahun 2025-2029

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	REALISASI & TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-							
				REALISASI		TARGET					
				1 (2023)	2 (2024)	3 (2025)	4 (2026)	5 (2027)	6 (2028)	7 (2029)	8 (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Meningkatkan Investasi Daerah	Meningkatkan Capaian Investasi	Persentase peningkatan investasi	86,7 %	-1,65 %	12,86 %	16,67 %	7,14 %	5,56 %	5,26 %	4,00 %



Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi, DPMPTSP Kota Samarinda memiliki Strategi dan yang ditempuh untuk mencapai tujuan dan sasaran, yaitu sebagai berikut:

1. Peningkatan Kebijakan Penanaman Modal dengan menciptakan Iklim Investasi yang kondusif dan dapat menarik minat Investor;

Sedangkan Arah kebijakan yang ditempuh oleh DPMPTSP Kota Samarinda adalah sebagai berikut:

1. Memberikan kemudahan bidang Penanaman Modal dan Percepatan Berusaha;

Tabel 3.2
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : “SAMARINDA MAJU UNTUK KALTIM MAJU”			
MISI II : MEWUJUDKAN EKONOMI SAMARINDA YANG INKLUSIF, MANDIRI DAN BERKELANJUTAN			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Investasi Daerah	Meningkatkan Capaian Investasi	Peningkatan Kebijakan Penanaman Modal dengan menciptakan iklim Investasi yang kondusif dan dapat menarik minat investor	Memberikan Kemudahan bidang Penanaman Modal dan Percepatan Berusaha

Tabel 3.3
Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra DPMPTSP Kota Samarinda

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUNAN					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Meningkatnya Peran Sektor Unggulan Daerah	Meningkatkan Investasi Daerah		Nilai Realisasi Penanaman Modal (triliun rupiah)	3.1	3,6	4,2	4,5	4,75	5	5,2
		Meningkatkan Capaian Investasi	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota (%)	-1,65	12,86	16,67	7,14	5,56	5,26	4,00



Strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra merupakan bagian penting dari implementasi perencanaan Pembangunan daerah. Strategi ini berfungsi sebagai jembatan antara apa yang ingin dicapai (tujuan dan sasaran). Strategi merupakan pendekatan umum atau rencana tindakan utama yang dirancang oleh perangkat daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Strategi merupakan serangkaian upaya yang dirancang secara sistematis dan terencana untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai proses pencapaian sasaran strategis dalam pembangunan daerah.

Strategi ini menjadi landasan dalam penyusunan kebijakan, program, dan langkah-langkah implementatif yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mempercepat pertumbuhan ekonomi, serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia. Dengan pendekatan yang komprehensif dan berbasis data, strategi pembangunan daerah diharapkan mampu mewujudkan visi dan misi Kota Samarinda secara inklusif dan berkelanjutan.

Tabel 3.4
Penahapan Renstra PD

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pemutakhiran data baseline investasi dan penyusunan Peta Potensi Investasi terintegrasi dengan tata ruang.	Penguatan iklim investasi berkelanjutan	Optimalisasi sistem pelaporan LKPM online	Penerapan one stop investment center terintegrasi penuh (perizinan + fasilitasi + pengawasan).	best practice pelayanan publik & investasi

Tabel 3.5
Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD

No	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Penetapan Perda Kemudahan Penanaman Modal, Rencana Umum Penanaman Modal, dan Profil Investasi	Mengembangkan program promosi dan insentif untuk menarik investor serta mempermudah proses perizinan	Memberikan Kemudahan Bidang Penanaman Modal dan Percepatan Berusaha	-
2.	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal, dan Peningkatan Pelaksanaan Promosi Investasi			
3.	Penyusunan SOP dan SP Pelayanan Penanaman Modal, Integrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Risiko dengan OSS-RBA dan Penyelenggaraan MPP			
4.	Peningkatan Pengawasan Pelaporan LKPM			
5.	Digitalisasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Risiko			
6.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik			



BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran Dan Pendanaan Indikatif

Rencana program prioritas selanjutnya dijabarkan kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan jangka menengah DPMPTSP yang telah ditetapkan. Program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DPMPTSP Kota Samarinda tahun 2025-2029 sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah meliputi:

1. PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL

1.1 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

- 1.1.1 Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
- 1.1.2 Fasilitas Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota
- 1.1.3 Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko

1.2 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota

- 1.2.1 Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
- 1.2.2 Pemutakhiran Data Potensi Investasi Daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)
- 1.2.3 Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota

2. PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL

2.1 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

- 2.1.1 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota



- 2.1.2 Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota

3. PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL

3.1 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

- 3.1.1 Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah
- 3.1.2 Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik
- 3.1.3 Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko
- 3.1.4 Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko

4. PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

4.1 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

- 4.1.1 Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya
- 4.1.2 Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha
- 4.1.3 Pengawasan Penanaman Modal

5. PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL

5.1 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

- 5.1.1 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

6. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

6.1 Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- 6.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- 6.1.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- 6.1.3 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah



- 6.1.4 Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- 6.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**
 - 6.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 6.2.2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - 6.2.3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- 6.3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**
 - 6.3.1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan
 - 6.3.2 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
- 6.4 Administrasi Umum Perangkat Daerah**
 - 6.4.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 6.4.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 6.4.3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - 6.4.4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 6.4.5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 6.4.6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - 6.4.7 Fasilitas Kunjungan Tamu
 - 6.4.8 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 6.5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
 - 6.5.1 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 6.5.2 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 6.5.3 Pengadaan Mebel
 - 6.5.4 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 6.5.5 Pengadaan Aset Tetap Lainnya
 - 6.5.6 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - 6.5.7 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 6.6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
 - 6.6.1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 6.6.2 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 6.6.3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor



6.7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 6.7.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan
- 6.7.2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan
- 6.7.3 Pemeliharaan Mebel
- 6.7.4 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 6.7.5 Pemeliharaan Aset tetap lainnya
- 6.7.6 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 6.7.7 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 6.7.8 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Berikut adalah Tabel Program dan Kegiatan Renstra DPMPTSP Kota Samarinda Tahun 2025-2029:



Tabel 4.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Tahun 2025-2029
DPMPTSP Kota Samarinda

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD Tahun 2030			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
Meningkatnya Realisasi Investasi	Tercapainya Realisasi Investasi	2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Realisasi Total Terhadap Target Investasi	106,33%	100%	1.125.845.950	100%	950.000.000	100%	971.850.000	100%	985.625.000	100%	999.423.000	100%	1.025.000.000	DPM PTSP	Smd
		2 18 02 2.01	1. Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Yang Menerima Fasilitas/ Insentif Kemudahan Penanaman Modal	0	20	267.823.800	25	-	25	321.850.000	30	321.850.000	30	300.000.000	30	300.000.000	DPM PTSP	Smd
		2 18 02 2.01 0001	1.1 Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1	0	0	0	0	1	321.850.000	1	321.850.000	0	-	0	-	DPM PTSP	Smd
		2 18 02 2.01 0003	1.2 Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	2	2	90.407.000	0	0	0	0	0	0	1	150.000.000	1	150.000.000	DPM PTSP	Smd
		2 18 02 2.01 0004	1.2 Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	2	2	177.416.800	0	0	0	0	0	0	1	150.000.000	1	150.000.000	DPM PTSP	Smd



Rencana Strategis
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda
2025-2029

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD Tahun 2030			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		2.18.02.2.02	2. Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota	Jumlah Proyek Investasi Yang Siap Ditawarkan	1	2	858.022.150	2	950.000.000	2	650.000.000	2	663.775.000	2	700.000.000	2	725.000.000	DPM PTSP	Smd
		2.18.02.2.02.0001	2.1 Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1	1	268.792.100	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	1	330.000.000	1	355.000.000	DPM PTSP	Smd
		2.18.02.2.02.0003	2.2 Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi	0	1	273.938.300	1	300.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	DPM PTSP	Smd
		2.18.02.2.02.0004	2.3 Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1	1	315.291.750	1	350.000.000	1	350.000.000	1	363.775.000	1	370.000.000	1	370.000.000	DPM PTSP	Smd
		2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Investor yang berinvestasi	5	5	802.045.600	10	1.100.000.000	15	1.126.400.000	20	1.142.900.000	25	1.142.900.000	30	1.175.000.000	DPM PTSP	Smd
		2.18.03.2.01	1. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Promosi yang diselenggarakan	4	3	802.045.600	4	1.100.000.000	4	1.126.400.000	4	1.142.900.000	4	1.142.900.000	4	1.175.000.000	DPM PTSP	Smd
		2.18.03.2.01.0002	1.1 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	4	2	714.776.000	3	1.000.000.000	3	1.000.000.000	3	1.000.000.000	3	1.000.000.000	3	1.075.000.000	DPM PTSP	Smd
		2.18.03.2.01.0003	1.2 Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah dokumen strategi Promosi	-	1	87.269.600	1	100.000.000	1	126.400.000	1	142.900.000	1	142.900.000	1	100.000.000	DPM PTSP	Smd



Rencana Strategis
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda
2025-2029

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD Tahun 2030			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Kewenangan Kabupaten/Kota	Penanaman Modal Kab/Kota															
		2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin sesuai Ketentuan	50	50	481.202.000	55	650.000.000	60	665.000.000	65	674.375.000	70	685.000.000	75	700.000.000	DPM PTSP	Smd
		2.18.04.2.01	1. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha yang patuh terhadap kewajiban Perizinan Berusaha	2212	2700	481.202.000	2750	650.000.000	2800	665.000.000	2850	674.375.000	2900	685.000.000	3000	700.000.000	DPM PTSP	Smd
		2 18 04 2.01 0005	1.1 Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	1	100.000.000	DPM PTSP	Smd
		2 18 04 2.01 0006	1.2 Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	5012	5400	244.301.000	5500	250.000.000	5600	265.000.000	5700	274.375.000	5800	285.000.000	6000	250.000.000	DPM PTSP	Smd



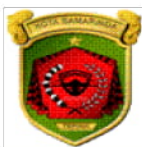
Rencana Strategis
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda
2025-2029

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penang-gung-jawab	Lokasi
						Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD Tahun 2030			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		2.18.04.2.01.0007	1.3 Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	40	40	99.247.000	40	200.000.000	44	200.000.000	46	200.000.000	48	200.000.000	50	150.000.000	DPM PTSP	Smd
		2.18.04.2.01.0008	1.4 Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	255	260	137.654.000	280	200.000.000	270	200.000.000	280	200.000.000	290	200.000.000	300	200.000.000	DPM PTSP	Smd
		2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha	100	25	150.982.000	30	450.000.000	35	460.800.000	40	467.550.000	45	467.550.000	50	475.000.000	DPM PTSP	Smd
		2.18.05.2.01	1. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian	200	400	150.982.000	400	450.000.000	450	460.800.000	450	467.550.000	475	467.550.000	500	475.000.000	DPM PTSP	Smd



Rencana Strategis
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda
2025-2029

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD Tahun 2030			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		2.18.05.2.01.0004	1.1 Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	50	50	47.360.000	50	100.000.000	75	110.800.000	75	117.550.000	75	117.550.000	100	125.000.000	DPM PTSP	Smd
		2.18.05.2.01.0005	1.2 Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	50	100	57.894.000	100	180.000.000	150	180.000.000	150	180.000.000	150	180.000.000	200	180.000.000	DPM PTSP	Smd
		2.18.05.2.01.0006	1.3 Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan	50	100	45.728.000	100	170.000.000	150	170.000.000	150	170.000.000	150	170.000.000	200	170.000.000	DPM PTSP	Smd



Rencana Strategis
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda
2025-2029

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD Tahun 2030			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
				Perizinan Berusaha															
		2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	55	60	264.378.000	65	300.000.000	70	306.900.000	75	311.250.000	80	311.250.000	90	315.475.000	DPM PTSP	Smd
		2.18.06.2.01	1. Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Sistem Informasi Penanaman Modal	5	5	264.378.000	15	300.000.000	25	306.900.000	50	311.250.000	75	311.250.000	100	315.475.000	DPM PTSP	Smd
		2 18 06 2.01 0002	1.1 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	5000	5000	264.378.000	15	300.000.000	5200	306.900.000	5300	311.250.000	5400	311.250.000	5500	315.475.000	DPM PTSP	Smd
		2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai Hasil Evaluasi (AKIP) Perangkat Daerah	79	81,00	25.171.819.321	82,00	17.389.420.481	82,00	20.806.766.000	82,50	21.041.523.700	83,00	21.462.354.100	83,50	21.891.601.250	DPM PTSP	Smd
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	92	92,50			93,00				93,25				93,50			



Rencana Strategis
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda
2025-2029

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD Tahun 2030			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		2.18.01.2.01.	1. Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai SOP	100 %	100	209.481.650	100	250.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000	DPM PTSP	Smd
		2.18.01.2.01.0001	- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	7	76.517.000	7	75.000.000	7	75.000.000	7	75.000.000	7	75.000.000	7	75.000.000	DPM PTSP	Smd
		2.18.01.2.01.0006	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Dokumen	4	37.208.000	4	75.000.000	4	75.000.000	4	75.000.000	4	75.000.000	4	75.000.000	DPM PTSP	Smd
		2.18.01.2.01.0007	- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	4	50.000.000	4	50.000.000	4	50.000.000	4	50.000.000	4	50.000.000	4	50.000.000	DPM PTSP	Smd
		2.18.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka	0	1	45.756.650	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	DPM PTSP	Smd



Rencana Strategis
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda
2025-2029

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD Tahun 2030			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah															
		2.18.01.2.02	2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang disusun dan dilaporkan secara tepat waktu	100 %	100	18.737.690.347	100	13.077.030.391	100	16.494.376.510	100	16.729.133.610	100	17.149.964.010	100	16.696.364.010	DPM PTSP	Smd
		2.18.01.2.02.0001	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	74 Orang	78	17.383.544.020	78	11.672.884.064	78	15.090.230.183	78	15.324.987.283	78	15.745.817.683	78	15.745.817.683	DPM PTSP	Smd
		2.18.01.2.02.0002	- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen	4	1.354.146.327	4	1.354.146.327	4	1.354.146.327	4	1.354.146.327	4	1.354.146.327	4	900.546.327	DPM PTSP	Smd
		2.18.01.2.02.0005	-Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Laporan	4	-	4	50.000.000	4	50.000.000	4	50.000.000	4	50.000.000	4	50.000.000	DPM PTSP	Smd
		2.18.01.2.05	5.Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai Perangkat Daerah yang mendapat pelayanan Kepegawaian	100 %	100	100.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	150.000.000	DPM PTSP	Smd
		2.18.01.2.05.0002	- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	1	100.000.000	DPM PTSP	Smd
		2.18.01.2.05.0011	- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis	10	10	100.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000	DPM PTSP	Smd



Rencana Strategis
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda
2025-2029

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penang-gung-jawab	Lokasi
						Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD Tahun 2030			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
				Implementasi Peraturan Perundang-Undangan															
		2.18.01.2.06	6.Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kegiatan administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi	100 %	100	1.286.389.500	100	759.449.366	100	759.449.366	100	759.449.366	100	759.449.366	100	759.449.366	DPM PTSP	Smd
		2.18.01.2.06.0001	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	3	150.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	DPM PTSP	Smd
		2.18.01.2.06.0002	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	2	75.000.000	2	75.000.000	5	75.000.000	2	75.000.000	2	75.000.000	2	75.000.000	DPM PTSP	Smd
		2.18.01.2.06.0003	- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-	4	140.000.000	4	90.000.000	4	90.000.000	2	90.000.000	4	90.000.000	4	90.000.000	DPM PTSP	Smd
		2.18.01.2.06.0004	- Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	15 Paket	2	80.000.000	2	80.000.000	2	80.000.000	2	80.000.000	2	80.000.000	2	80.000.000	DPM PTSP	Smd
		2.18.01.2.06.0005	- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	5	549.000.000	2	150.000.000	5	150.000.000	3	150.000.000	3	150.000.000	3	150.000.000	DPM PTSP	Smd
		2.18.01.2.06.0006	- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan yang Disediakan	1 Dokumen	1	35.000.000	2	35.000.000	2	35.000.000	2	35.000.000	2	35.000.000	2	35.000.000	DPM PTSP	Smd



Rencana Strategis
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda
2025-2029

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD Tahun 2030			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		2.18.01.2.06.0008	- Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	20 Laporan	8	80.000.000	10	80.000.000	10	80.000.000	10	80.000.000	10	80.000.000	10	80.000.000	DPM PTSP	Smd
		2.18.01.2.06.0009	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8 Laporan	7	177.389.500	6	149.449.366	6	149.449.366	6	149.449.366	6	149.449.366	6	149.449.366	DPM PTSP	Smd
		2.18.01.2.07	7.Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang	60 %	65	258.600.000	70	330.000.000	75	330.000.000	80	330.000.000	85	330.000.000	90	510.787.874	DPM PTSP	Smd
		2.18.01.2.07.0001	- Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1	1	50.000.000	1	130.000.000	1	130.000.000	1	130.000.000	1	130.000.000	1	150.000.000	DPM PTSP	Smd
		2.18.01.2.07.0002	- Pengadaan Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	1	100.000.000	DPM PTSP	Smd
		2.18.01.2.07.0005	- Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket	2	100.000.000	5	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	1	60.787.874	DPM PTSP	Smd
		2.18.01.2.07.0006	- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2	2	108.600.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	50.000.000	DPM PTSP	Smd
		2.18.01.2.07.0007	- Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	1	50.000.000	DPM PTSP	Smd
		2.18.01.2.07.0010	- Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	1	50.000.000	DPM PTSP	Smd



Rencana Strategis
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda
2025-2029

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penang-gung-jawab	Lokasi
						Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD Tahun 2030			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
				Lainnya yang Disediakan															
		2.18.01.2.07.0011	- Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	1	50.000.000	DPM PTSP	Smd
		2.18.01.2.08	8.Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang yang terpenuhi sesuai SOP	100 %	100	3.159.657.824	100	2.222.940.724	100	2.222.940.124	100	2.222.940.724	100	2.222.940.724	100	2.750.000.000	DPM PTSP	Smd
		2.18.01.2.08.0002	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	4	688.940.724	4	688.940.724	4	688.940.124	4	688.940.724	4	688.940.724	4	850.000.000	DPM PTSP	Smd
		2.18.01.2.08.0003	- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Laporan	4	265.000.000	4	265.000.000	4	265.000.000	4	265.000.000	4	265.000.000	4	100.000.000	DPM PTSP	Smd
		2.18.01.2.08.0004	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	4	2.205.717.100	4	1.269.000.000	4	1.269.000.000	4	1.269.000.000	4	1.269.000.000	4	1.800.000.000	DPM PTSP	Smd
		2.18.01.2.09	9. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	80 %	85	1.420.000.000	86	700.000.000	87	700.000.000	88	700.000.000	89	700.000.000	90	775.000.000	DPM PTSP	Smd
		2.18.01.2.09.0001	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Jumlah Kendaraan	8 Unit	7	200.000.000	8	150.000.000	8	150.000.000	8	150.000.000	8	150.000.000	8	150.000.000	DPM PTSP	Smd



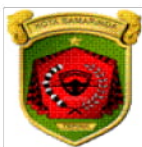
Rencana Strategis
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda
2025-2029

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD Tahun 2030			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan	Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya															
		2.18.01.2.09.0002	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	5	200.000.000	5	150.000.000	5	150.000.000	5	150.000.000	5	150.000.000	5	125.000.000	DPM PTSP	Smd
		2.18.01.2.09.0005	- Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	2	2	120.000.000	5	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	DPM PTSP	Smd
		2.18.01.2.09.0006	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5	5	250.000.000	5	150.000.000	5	150.000.000	5	150.000.000	5	150.000.000	5	100.000.000	DPM PTSP	Smd
		2.18.01.2.09.0007	- Pemeliharaan Aset tetap lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	1	100.000.000	DPM PTSP	Smd
		2.18.01.2.09.0009	- Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Gedung	1	650.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	100.000.000	DPM PTSP	Smd
		2.18.01.2.09.0010	- Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	1	50.000.000	DPM PTSP	Smd



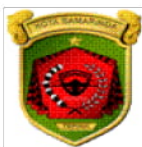
Rencana Strategis
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda
2025-2029

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD Tahun 2030			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		2.18.01.2.09.0011	-Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 jenis	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	1	50.000.000	DPM PTSP	Smd
JUMLAH TOTAL							27.996.272.871		20.839.420.481		24.337.716.000		24.623.223.700		25.069.054.100		25.582.076.250		



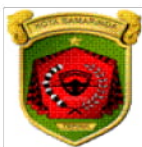
Tabel 4.2
Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra DPMPTSP Kota Samarinda

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
2.18.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda							
- Meningkatnya peran sektor unggulan daerah	Meningkatnya Realisasi Investasi	Tercapainya Realisasi Investasi	Meningkatnya kualitas tata kelola dan kinerja perangkat daerah		Nilai Realisasi Penanaman Modal (triliun rupiah)		
					Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota (%)		
					Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Nilai)	2.18.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah (Nilai)	2.18.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai SOP	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	2.18.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2.18.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2.18.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2.18.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2.18.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2.18.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	

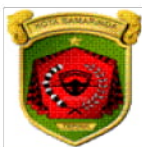


Rencana Strategis
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda
2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2.18.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	2.18.01.2.01.0010 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang disusun dan dilaporkan secara tepat waktu	2.18.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	2.18.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	2.18.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	2.18.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	2.18.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	2.18.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	2.18.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
					Persentase Pegawai Perangkat Daerah yang mendapat pelayanan Kepegawaian	2.18.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	2.18.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	2.18.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	2.18.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	2.18.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
					Persentase kegiatan administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi	2.18.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2.18.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

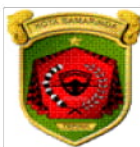


NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	2.18.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.18.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2.18.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2.18.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.18.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.18.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	2.18.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.18.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.18.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	2.18.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2.18.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2.18.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2.18.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	2.18.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.18.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Tingkat pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	2.18.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	



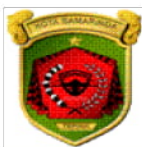
Rencana Strategis
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda
2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.18.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	2.18.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	2.18.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.18.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.18.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.18.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	2.18.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	2.18.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	2.18.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.18.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.18.01.2.07.0007 - Pengadaan Aset Tetap Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.18.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.18.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.18.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.18.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Persentase jasa penunjang yang terpenuhi sesuai SOP			



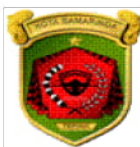
Rencana Strategis
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PINTU Kota Samarinda
2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.18.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.18.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.18.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.18.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2.18.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.18.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan	2.18.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2.18.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	2.18.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2.18.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.18.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.18.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2.18.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	



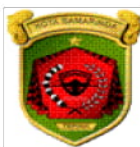
Rencana Strategis
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda
2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2.18.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	2.18.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2.18.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2.18.01.2.09.0007 - Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.18.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.18.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.18.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Jumlah Pelaku Usaha yang Menerima Fasilitas/Insentif Kemudahan Penanaman Modal	Realisasi Total terhadap Target Investasi (Persentase)	2.18.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	
					Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah (Dokumen)	2.18.02.2.01 - Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Diberikan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (Dokumen)	2.18.02.2.01 - Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Diberikan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Dokumen)	2.18.02.2.01 - Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Diberikan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (Dokumen)	2.18.02.2.01.0001 - Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	
					Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah (Dokumen)	2.18.02.2.01.0003 - Fasilitas Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	



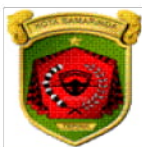
Rencana Strategis
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda
2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Jumlah Proyek Investasi yang Siap Ditawarkan	Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Dokumen)	2.18.02.2.01.0004 - Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	
					Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi (Daerah)	2.18.02.2.02 - Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.18.02.2.02 - Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	
					Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.18.02.2.02 - Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	
					Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.18.02.2.02.0001 - Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi (Daerah)	2.18.02.2.02.0003 - Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	
					Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.18.02.2.02.0004 - Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya Jangkauan Promosi Penanaman Modal	Jumlah Event Promosi	Persentase Peningkatan Investor yang berinvestasi (%)	2.18.03 - PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	
					Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.18.03.2.01 - Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota (Dokumen)	2.18.03.2.01 - Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.18.03.2.01.0002 - Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota (Dokumen)	2.18.03.2.01.0003 - Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya Perizinan Berusaha Berbasis Risiko		Persentase Pelaku Usaha yang memperoleh Izin Sesuai Ketentuan (%)	2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	



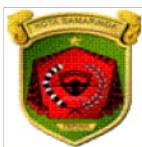
Rencana Strategis
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda
2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Jumlah Pelaku Usaha patuh terhadap kewajiban Perizinan Berusaha	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.18.04.2.01 - Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	
					Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha (Kegiatan Usaha)	2.18.04.2.01 - Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	
					Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)	2.18.04.2.01 - Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	
					Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)	2.18.04.2.01 - Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	
					Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.18.04.2.01.0005 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	
					Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)	2.18.04.2.01.0006 - Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	
					Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)	2.18.04.2.01.0007 - Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	
					Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha (Kegiatan Usaha)	2.18.04.2.01.0008 - Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	



Rencana Strategis
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda
2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Terkendalinya Pelaksanaan Penanaman Modal		Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha (%)	2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	
				Jumlah Laporan Pengendalian	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha (Kegiatan Usaha)	2.18.05.2.01 - Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Pelaku Usaha)	2.18.05.2.01 - Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya (Kegiatan Usaha.)	2.18.05.2.01 - Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya (Kegiatan Usaha.)	2.18.05.2.01.0004 - Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	
					Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Pelaku Usaha)	2.18.05.2.01.0005 - Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	
					Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha (Kegiatan Usaha)	2.18.05.2.01.0006 - Pengawasan Penanaman Modal	
					Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal (%)	2.18.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	
			Meningkatnya Pemanfaatan dan Informasi Penanaman Modal				



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Sistem Informasi Penanaman Modal	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan (Dokumen)	2.18.06.2.01 - Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan (Dokumen)	2.18.06.2.01.0002 - Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	



Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Indikator kinerja DPMPTSP Kota Samarinda tahun 2025-2029 yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kota Samarinda adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai DPMPTSP Kota Samarinda tahun 2025-2029 dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Samarinda Tahun 2025-2029. Indikator kinerja DPMPTSP Kota Samarinda yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kota Samarinda Tahun 2025-2029 ini menjadi tolak ukur kinerja dalam evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di DPMPTSP Kota Samarinda. Indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur.

Sebagaimana tercantum dalam RPJMD, indikator kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda tahun 2025-2029 yang mengacu pada tujuan dan sasaran Perubahan RPJMD Kota Samarinda Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

Tabel 4.3
Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Nilai Investasi	Rp. 3.189.856.172.525,-	Rp. 3.600.000.000.000,-	Rp. 4.200.000.000.000,-	Rp. 4.500.000.000.000,-	Rp. 4.750.000.000.000,-	Rp. 5.000.000.000.000,-	Rp. 5.200.000.000.000,-
2	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	65,33	66,10	66,80	67,50	68,00	70,10	70,10
3	Indeks Pelayanan Publik	4,26	4,30	4,35	4,42	4,46	4,5	4,5



Tabel 4.4
Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No.	Tujuan	Sasaran	Program Prioritas	Outcome	Sub Kegiatan	Indikator
1	2	3	4	5	6	7
1	Terwujudnya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif	Meningkatnya Peran Sektor Unggulan Daerah	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Meningkatnya Kemudahan Berinvestasi	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota
			Program Promosi Penanaman Modal	Meningkatnya Jangkauan Promosi Penanaman Modal	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota
			Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Terkendalinya Pelaksanaan Penanaman Modal	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha
2	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Program Pelayanan Penanaman Modal	Meningkatnya Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Utama PD

Kode	Program Pembangunan Daerah	Alasan Indikator	Indikator	Formulasi	Satuan	Target					
						2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.18	Meningkatkan Capaian Investasi	Sebagai Salah Satu Upaya dalam Mewujudkan Kota Samarinda Sebagai tujuan Investasi dengan meningkatkan pengembangan potensi investasi guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah	Persentase Peningkatan Investasi di Kabupaten/ Kota	(Jumlah investasi tahun n dikurangi dengan jumlah investasi tahun n-1) dibagi dengan jumlah investasi tahun n-1 dikali 100%"	%	12,86	16,67	7,14	5,56	5,26	4,00



Tabel 4.6
Indikator Kinerja Kunci PD

No	Indikator	Formulasi	Baseline		Satuan	Target Tahun					
			2023	2024		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Realisasi Total Terhadap Target Investasi	Jumlah Realisasi Investasi Total terhadap Target Investasi	154,45	106,33	%	100	100	100	100	100	100
2	Persentase Peningkatan Investor yang berinvestasi	Jumlah Investor Saat Ini dikurang Jumlah Investor Sebelumnya dibagi Jumlah Investor Sebelumnya dikali 100 %	5	7	%	10	15	20	25	30	35
3	Persentase Pelaku Usaha yang memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	Jumlah Keseluruhan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dibagi Jumlah Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang Sesuai ketentuan di kali 100 %	60	65	%	70	75	80	85	90	95
4	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha	Jumlah Permasalahan yang diselesaikan dibagi jumlah total permasalahan yang dilaporkan dikali 100 %	100	100	%	100	100	100	100	100	100
5	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	Jumlah Data/Informasi yang dimanfaatkan dibagi jumlah Data Informasi yang tersedia dikali 100 %	50	55	%	60	65	70	75	80	85

Tabel 4.7
Indikator Kinerja Daerah

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
2.18.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda										
I	ASPEK DAYA SAING DAERAH									
1	Nilai Realisasi Penanaman Modal	triliun rupiah	3,1	3,6	4,2	4,5	4,75	5	5,2	
II	INDIKATOR KINERJA KUNCI									
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	92	92,5	93	93,25	93,5	93,75	94	
2	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Nilai	79	81	82	82	82,5	83	83,5	
3	Realisasi Total terhadap Target Investasi	Persentase	106,33	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase Peningkatan Investor yang berinvestasi	%	7	10	15	20	25	30	35	
5	Persentase Pelaku Usaha yang memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	%	65	70	75	80	85	90	95	
6	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha	%	100	100	100	100	100	100	100	
7	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	%	55	60	65	70	75	80	85	

BAB V PENUTUP

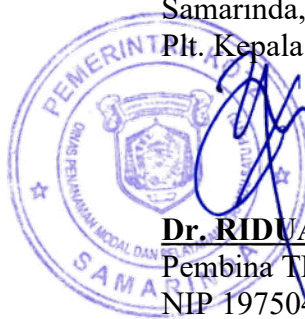
Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda tahun 2025-2029 merupakan rencana pembangunan selama 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, strategi kebijakan, program dan kegiatan. Penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Samarinda Tahun 2025-2029 dan bersifat indikatif. Renstra dimaksudkan untuk memberi arah dan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang dilaksanakan oleh DPMPTSP Kota Samarinda dalam kurun waktu lima tahun.

Kaidah pelaksanaan yang perlu diatur dalam pelaksanaan Renstra DPMPTSP Kota Samarinda tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Seluruh unit dan jabatan pada DPMPTSP Kota Samarinda agar mendukung pencapaian target-target Renstra tahun 2025-2029, dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra DPMPTSP dengan sebaik-baiknya;
2. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) DPMPTSP dalam kurun waktu 5 (lima) tahun wajib berpedoman pada Perubahan Renstra DPMPTSP Kota Samarinda tahun 2025-2029;
3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra DPMPTSP Kota Samarinda tahun 2025-2029, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.

Samarinda, 30 Oktober 2025

Plt. Kepala DPMPTSP Kota Samarinda



Dr. RIDUANSAH, SE, M.Si

Pembina TK.I / IVb

NIP 19750421 200604 1 017



L A M P I R A N



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Jalan Pahlawan No.1 RT. 34 Gedung MPP Samarinda 75123,
Email : dpmpmsp.smd@gmail.com Website : dpmpmsp.samarindakota.go.id

BERITA ACARA
KESEPAKATAN RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA SAMARINDA
TAHUN 2025-2029

Pada hari ini **Senin** tanggal **Enam** bulan **Oktober** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima**, bertempat di **Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda** telah dilaksanakan verifikasi terhadap Rancangan Akhir Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025-2029 oleh unsur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana tercantum pada daftar hadir peserta dalam Lampiran I Berita Acara ini.

Setelah mendengar dan memperhatikan :

- 1) Penyampaian materi substansi Rancangan Akhir Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025-2029, yang disampaikan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (atau yang mewakili);
- 2) Penyampaian saran, tanggapan, dan koreksi dari Tim Pembahas atas Rancangan Akhir Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025-2029;

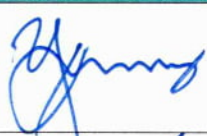
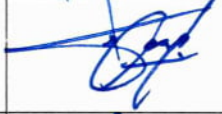
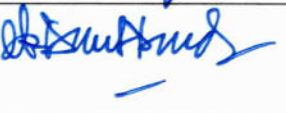
Seluruh peserta,

MENYEPAKATI

- | | | |
|---------|---|--|
| Kesatu | : | Rumusan Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II berita acara ini; |
| Kedua | : | Rumusan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III berita acara ini; |
| Ketiga | : | Kesesuaian RPJMD dengan RENSTRA sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV berita acara ini; |
| Keempat | : | Rumusan Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan (termasuk indikator kinerja, target kinerja, dan pagu indikatif) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V berita acara ini; |
| Kelima | : | Rumusan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang menjadi kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI berita acara ini; |
| Keenam | : | Rumusan yang tercantum dalam Lampiran I, II, III, IV, V dan VI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini untuk dijadikan sebagai bahan penyempurnaan Rancangan Akhir Renstra PD Tahun 2025-2029; |
| Ketujuh | : | Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Berita Acara ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. |

Demikian Berita Acara hasil verifikasi Rancangan Akhir Renstra PD Tahun 2025-2029 ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mewakili unsur peserta forum,

NO	NAMA	Jabatan	TANDA TANGAN
1	Dr. Riduansah, SE, M.Si NIP 197504212006041017 Pembina Tingkat I (IV/b)	Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda	
2	Akhmad Suprayetno, S.Sos, MM NIP 19681028 198902 1 001 Pembina (IV/a)	Jafung Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya	
3	Siti Istichanah, SE, M.Psi NIP 196804061991032013 Pembina (IV/a)	Jafung Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya	
4	Tatang Wahyudi, SP, M.Si NIP 197709102000031003 Pembina (IV/a)	Jafung Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya	
5	Chairuddin, S.Hut NIP 19690507 200003 1 009 Pembina (IV/a)	Jafung Penata Perizinan Ahli Madya	
6	Rosana, ST NIP 19730325 199903 2 008 Pembina (IV/a)	Jafung Penata Perizinan Ahli Madya	

LAMPIRAN II

BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SAMARINDA TAHUN 2025-2029

No	Masalah Pokok	Masalah		Akar Masalah	
-1	-2	-3		-4	
1	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal				
	Belum optimalnya Realisasi Investasi di Kota Samarinda	1	Masih rendahnya Minat Investor untuk berinvestasi di Kota Samarinda	1	Belum adanya Profil Investasi Daerah yang menarik minat Investasi.
				2	Kurangnya Keikutsertaan dalam Forum Promosi Investasi dalam skala Nasional dan Internasional
				3	Belum Terintegrasinya secara penuh seluruh Layanan OPD Teknis Terkait Dalam Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP).
				4	Masih Rendahnya Kesadaran Pelaku Usaha untuk melaporkan Kegiatan Penanaman Modal di Kota Samarinda
				5	Belum adanya Konektivitas Antar Sistem Pelayanan Digital yang dimiliki oleh DPMPTSP dengan OPD Teknis Terkait dan Instansi Vertikal

ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

1. Iklim Investasi yang Kondusif.

LAMPIRAN III**BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SAMARINDA
TAHUN 2025-2029**

Tujuan (1)	Sasaran (2)	Strategi (3)	Arah Kebijakan (4)
Meningkatkan Investasi Daerah	Meningkatkan Capaian Investasi	Peningkatan Kebijakan Penanaman Modal dengan menciptakan iklim Investasi yang kondusif dan dapat menarik minat investor	Memberikan Kemudahan bidang Penanaman Modal dan Percepatan Berusaha

**BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SAMARINDAS
TAHUN 2025-2029**

KESESUAIAN PROGRAM RPJMD DENGAN PROGRAM RENSTRA

[illegible]

Nomenklatur Program	Indikator	Kondisi Awal 2023	Kondisi Awal 2024	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Target 2030
Pelaksanaan Penanaman Modal	Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha								
RPJMD									
Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	50,00%	55,00%	60,00%	65,00%	70,00%	75,00%	80,00%	85,00%
RENSTRA									
Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	50,00%	55,00%	60,00%	65,00%	70,00%	75,00%	80,00%	85,00%

LAMPIRAN V

BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SAMARINDA TAHUN 2025-2029

Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Outcome (Hanya untuk Program)	Indikator	Formulasi	Kondisi Awal		Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir		Perangk at Daerah
								2025		2026		2027		2028		2029		2030				
					2023	2024		Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4		4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																					
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL																					
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Meningkatnya Kemudahan Berinvestasi	Realisasi Total Terhadap Target Investasi	Persentase Realisasi Investasi di bagi Target Investasi di kali 100 %	154.45	106,33	%	100%	1.125.84 5.950	100%	950.000 .000	100%	971.850. 000	100%	985.625. 000	100%	999.423 .000	100%	1.025.0 00.000	100%	1.025.0 00.000	DPMPTSP
2 18 02 2.01	1. Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Pelaku Usaha Yang Menerima Fasilitas/ Insentif Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha Yang Menerima Fasilitas/ Insentif Kemudahan Penanaman Modal	0	0	Pelaku Usaha	20	267.823. 800	25	-	25	321.850. 000	30	321.850. 000	30	300.000 .000	30	300.000 .000	30	300.000 .000	DPMPTSP
2 18 02 2.01 0001	1.1 Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal		Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	0	1	Peraturan Daerah	0	0	0	0	1	321.850. 000	1	321.850. 000	0	-	0	-	0	-	DPMPTSP
2 18 02 2.01 0003	1.2 Fasilitas Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota		Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	Jumlah Kesepakatan Kemitraan	0	2	Kese pakatan	2	90.407.0 00	0	0	0	0	0	0	1	150.000 .000	1	150.000 .000	1	150.000 .000	DPMPTSP
2 18 02 2.01 0004	1.2 Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko		Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi	0	2	Rekomen dasi	2	177.416. 800	0	0	0	0	0	0	1	150.000 .000	1	150.000 .000	1	150.000 .000	DPMPTSP

Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Outcome (Hanya untuk Program)	Indikator	Formulasi	Kondisi Awal		Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir		Perangk at Daerah
								2025		2026		2027		2028		2029		2030				
					2023	2024		Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4		4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2.18.02.2.02	2. Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota		Jumlah Proyek Investasi Yang Siap Ditawarkan	Jumlah Proyek Investasi Yang Siap Ditawarkan	1	1	Proyek Investasi	2	858.022.150	2	950.000.000	2	650.000.000	2	663.775.000	2	700.000.000	2	725.000.000	2	725.000.000	DPMPTSP
2 18 02 2.02 0001	2.1 Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	"Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota"	1	1	Perda	1	268.792.100	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	1	330.000.000	1	355.000.000	1	355.000.000	DPMPTSP
2 18 02 2.02 0003	2.2 Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)		Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi	Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi	0	0	daerah	1	273.938.300	1	300.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	DPMPTSP
2 18 02 2.02 0004	2.3 Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1	1	Dokumen	1	315.291.750	1	350.000.000	1	350.000.000	1	363.775.000	1	370.000.000	1	370.000.000	1	370.000.000	DPMPTSP
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Meningkatnya Jangkauan Promosi Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Investor yang berinvestasi	Jumlah Investor Saat ini dikurang Jumlah Investor Sebelumnya dibagi Jumlah Investor Sebelumnya dikali 100 %	5	5	%	5	802.045.600	10	1.100.000.000	15	1.126.400.000	20	1.142.900.000	25	1.142.900.000	30	1.175.000.000	30	1.175.000.000	DPMPTSP
2.18.03.2.01	1. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Promosi yang diselenggarakan	Jumlah Event Promosi yang diikuti/diselenggarakan	4	4	Event	3	802.045.600	4	1.100.000.000	4	1.126.400.000	4	1.142.900.000	4	1.142.900.000	4	1.175.000.000	4	1.175.000.000	DPMPTSP
2 18 03 2.01 0002	1.1 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi	4	4	Dokumen	2	714.776.000	3	1.000.000.000	3	1.000.000.000	3	1.000.000.000	3	1.000.000.000	3	1.075.000.000	3	1.075.000.000	DPMPTSP
2 18 03 2.01 0003	1.2 Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	Jumlah Peraturan Daerah yang ditetapkan	0	-	Peraturan Daerah	1	87.269.600	1	100.000.000	1	126.400.000	1	142.900.000	1	142.900.000	1	100.000.000	1	100.000.000	DPMPTSP
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Meningkatnya Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin sesuai Ketentuan	Jumlah Keseluruhan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dibagi Jumlah Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang Sesuai ketentuan di kali 100 %	50	50	%	50	481.202.000	55	650.000.000	60	665.000.000	65	674.375.000	70	685.000.000	75	700.000.000	75	700.000.000	DPMPTSP

Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Outcome (Hanya untuk Program)	Indikator	Formulasi	Kondisi Awal		Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir		Perangk at Daerah
								2025		2026		2027		2028		2029		2030				
					2023	2024		Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4		4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2.18.04.2.01	1. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Pelaku Usaha yang patuh terhadap kewajiban Perizinan Berusaha	Jumlah Pelaku usaha yang memenuhi kewajiban perizinan berusaha	2032	2212	Pelaku usaha	2700	481.202.000	2750	650.000.000	2800	665.000.000	2850	674.375.000	2900	685.000.000	3000	700.000.000	3000	700.000.000	DPMPTSP
2 18 04 2.01 0005	1.1 Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah		Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	0	0	Kegiatan	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	1	100.000.000	1	100.000.000	DPMPTSP
2 18 04 2.01 0006	1.2 Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik		Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan		5012	Pelaku Usaha	5400	244.301.000	5500	250.000.000	5600	265.000.000	5700	274.375.000	5800	285.000.000	6000	250.000.000	6000	250.000.000	DPMPTSP
2 18 04 2.01 0007	1.3 Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko		Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi Pengaduan	40	40	Pelaku Usaha	40	99.247.000	40	200.000.000	44	200.000.000	46	200.000.000	48	200.000.000	50	150.000.000	50	150.000.000	DPMPTSP
2 18 04 2.01 0008	1.4 Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko		Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan	250	255	Kegiatan Usaha	260	137.654.000	280	200.000.000	270	200.000.000	280	200.000.000	290	200.000.000	300	200.000.000	300	200.000.000	DPMPTSP
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Terkendalin ya Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha	Jumlah Permasalahan yang diselesaikan dibagi jumlah total permasalahan yang dilaporkan dikali 100 %	100	100	%	25	150.982.000	30	450.000.000	35	460.800.000	40	467.550.000	45	467.550.000	50	475.000.000	50	475.000.000	DPMPTSP

Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Outcome (Hanya untuk Program)	Indikator	Formulasi	Kondisi Awal		Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir		Perangk at Daerah
								2025		2026		2027		2028		2029		2030				
					2023	2024		Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4		4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2.18.05.2.01	1. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Pelaku Usaha yang Melaporkan LKPM	Jumlah Pelaku Usaha yang Melaporkan LKPM	150	200	Pelaku Usaha	400	150.982.000	400	450.000.000	450	460.800.000	450	467.550.000	475	467.550.000	500	475.000.000	500	475.000.000	DPMPTSP
2 18 05 2.01 0004	1.1 Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya		Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan	50	50	Kegiatan Usaha	50	47.360.000	50	100.000.000	75	110.800.000	75	117.550.000	75	117.550.000	100	125.000.000	100	125.000.000	DPMPTSP
2 18 05 2.01 0005	1.2 Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha		Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Pelaku Usaha yang dibina	50	100	Pelaku Usaha	100	57.894.000	100	180.000.000	150	180.000.000	150	180.000.000	150	180.000.000	200	180.000.000	200	180.000.000	DPMPTSP
2 18 05 2.01 0006	1.3 Pengawasan Penanaman Modal		Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	Jumlah Kegiatan Usaha yang diawasi	50	50	Kegiatan Usaha	100	45.728.000	100	170.000.000	150	170.000.000	150	170.000.000	150	170.000.000	200	170.000.000	200	170.000.000	DPMPTSP
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Meningkatnya Pemanfaatan dan Informasi Penanaman Modal	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	Jumlah Data/Informasi yang dimanfaatkan dibagi jumlah Data Informasi yang tersedia dikali 100 %	50	55	%	60	264.378.000	65	300.000.000	70	306.900.000	75	311.250.000	80	311.250.000	90	315.475.000	90	315.475.000	DPMPTSP
2.18.06.2.01	1. Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Sistem Informasi Penanaman Modal	Jumlah Pelayanan Online dibagi seluruh jumlah pelayanan dikali 100 %	5	5	%	5	264.378.000	15	300.000.000	25	306.900.000	50	311.250.000	75	311.250.000	100	315.475.000	100	315.475.000	DPMPTSP
2 18 06 2.01 0002	1.1 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis		Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem	Jumlah Data dan informasi yang dikelola, disajikan dan	5000	5000	Dokumen	5000	264.378.000	15	300.000.000	5200	306.900.000	5300	311.250.000	5400	311.250.000	5500	315.475.000	5500	315.475.000	DPMPTSP

Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Outcome (Hanya untuk Program)	Indikator	Formulasi	Kondisi Awal		Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir		Perangk at Daerah
								2025		2026		2027		2028		2029		2030				
					2023	2024		Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4		4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2.18.01.2.0 1. 0007	- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	4	Laporan	4	50.000.0 00	4	50.000. 000	4	50.000.0 00	4	50.000.0 00	4	50.000. 000	4	50.000. 000	4	50.000. 000	DPMPTSP
2.18.01.2.0 1. 0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jmlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah	0	1	Berita Acara	1	45.756.6 50	1	50.000. 000	1	50.000.0 00	1	50.000.0 00	1	50.000. 000	1	50.000. 000	1	50.000. 000	DPMPTSP
2.18.01.2.0 2	2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang disusun dan dilaporkan secara tepat waktu	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang disusun dan dilaporkan secara tepat waktu	100	100	%	100	18.737.6 90.347	100	13.077. 030.391	100	16.494.3 76.510	100	16.729.1 33.610	100	17.149. 964.010	100	16.696. 364.010	100	16.696. 364.010	DPMPTSP
2.18.01.2.0 2. 0001	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	74	74	orang	78	17.383.5 44.020	78	11.672. 884.064	78	15.090.2 30.183	78	15.324.9 87.283	78	15.745. 817.683	78	15.745. 817.683	78	15.745. 817.683	DPMPTSP
2.18.01.2.0 2. 0002	- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4	4	Dokumen	4	1.354.14 6.327	4	1.354.1 46.327	4	1.354.14 6.327	4	1.354.14 6.327	4	1.354.1 46.327	4	900.546 .327	4	900.546 .327	DPMPTSP
2.18.01.2.0 2.0005	-Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4	4	Laporan	4	-	4	50.000. 000	4	50.000.0 00	4	50.000.0 00	4	50.000. 000	4	50.000. 000	4	50.000. 000	DPMPTSP
2.18.01.2.0 5	5.Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Pegawai Perangkat Daerah yang mendapat pelayanan Kepegawaian	Persentase Pegawai Perangkat Daerah yang mendapat pelayanan Kepegawaian	100	100	%	100	100.000. 000	100	50.000. 000	100	50.000.0 00	100	50.000.0 00	100	50.000. 000	100	150.000 .000	100	150.000 .000	DPMPTSP
2.18.01.2.0 5. 0002	- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1	0	paket	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	1	100.000 .000	1	100.000 .000	DPMPTSP
2.18.01.2.0 5. 0011	- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10	10	orang	10	100.000. 000	5	50.000. 000	5	50.000.0 00	5	50.000.0 00	5	50.000. 000	5	50.000. 000	5	50.000. 000	DPMPTSP
2.18.01.2.0 6	6.Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase kegiatan administasi umum perangkat daerah yang terpenuhi	Persentase kegiatan administasi umum perangkat daerah yang terpenuhi	100	100	%	100	1.286.38 9.500	100	759.449 .366	100	759.449. 366	100	759.449. 366	100	759.449 .366	100	759.449 .366	100	759.449 .366	DPMPTSP

Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Outcome (Hanya untuk Program)	Indikator	Formulasi	Kondisi Awal		Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir		Perangk at Daerah
								2025		2026		2027		2028		2029		2030				
					2023	2024		Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4		4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2.18.01.2.0 6. 0001	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2	2	Paket	3	150.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	DPMPTSP
2.18.01.2.0 6. 0002	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3	2	Paket	2	75.000.000	2	75.000.000	5	75.000.000	2	75.000.000	2	75.000.000	2	75.000.000	2	75.000.000	DPMPTSP
2.18.01.2.0 6. 0003	- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2	3	Paket	4	140.000.000	4	90.000.000	4	90.000.000	2	90.000.000	4	90.000.000	4	90.000.000	4	90.000.000	DPMPTSP
2.18.01.2.0 6. 0004	- Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2	2	Paket	2	80.000.000	2	80.000.000	2	80.000.000	2	80.000.000	2	80.000.000	2	80.000.000	2	80.000.000	DPMPTSP
2.18.01.2.0 6. 0005	- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3	3	Paket	5	549.000.000	2	150.000.000	5	150.000.000	3	150.000.000	3	150.000.000	3	150.000.000	3	150.000.000	DPMPTSP
2.18.01.2.0 6. 0006	- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan yang Disediakan	2	2	Dokumen	1	35.000.000	2	35.000.000	2	35.000.000	2	35.000.000	2	35.000.000	2	35.000.000	2	35.000.000	DPMPTSP
2.18.01.2.0 6. 0008	- Fasilitas Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12	8	Laporan	8	80.000.000	10	80.000.000	10	80.000.000	10	80.000.000	10	80.000.000	10	80.000.000	10	80.000.000	DPMPTSP
2.18.01.2.0 6. 0009	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10	8	Laporan	7	177.389.500	6	149.449.366	6	149.449.366	6	149.449.366	6	149.449.366	6	149.449.366	6	149.449.366	DPMPTSP
2.18.01.2.0 7	7.Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Tingkat pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang	Tingkat pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang	55	60	%	65	258.600.000	70	330.000.000	75	330.000.000	80	330.000.000	85	330.000.000	90	510.787.874	90	510.787.874	DPMPTSP
2.18.01.2.0 7. 0001	- Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1	1	Unit	1	50.000.000	1	130.000.000	1	130.000.000	1	130.000.000	1	130.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	DPMPTSP
2.18.01.2.0 7. 0002	- Pengadaan Kendaraan Dinas Oprasional atau		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau	0	0	Unit	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	1	100.000	1	100.000	DPMPTSP

Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Outcome (Hanya untuk Program)	Indikator	Formulasi	Kondisi Awal		Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir		Perangk at Daerah
								2025		2026		2027		2028		2029		2030				
					2023	2024		Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4		4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Lapangan		Lapangan yang Disediakan	Lapangan yang Disediakan															.000		.000	
2.18.01.2.0 7.0005	- Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2	2	Paket	2	100.000. 000	5	100.000 .000	2	100.000. 000	2	100.000. 000	2	100.000 .000	1	60.787. 874	1	60.787. 874	DPMPTSP
2.18.01.2.0 7. 0006	- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2	2	Unit	2	108.600. 000	1	100.000 .000	1	100.000. 000	1	100.000. 000	1	100.000 .000	1	50.000. 000	1	50.000. 000	DPMPTSP
2.18.01.2.0 7. 0007	- Pengadaan Aset Tetap Lainnya		Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	0	0	Unit	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	1	50.000. 000	1	50.000. 000	DPMPTSP
2.18.01.2.0 7. 0010	- Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	0	Unit	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	1	50.000. 000	1	50.000. 000	DPMPTSP
2.18.01.2.0 7. 0011	- Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	0	Unit	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	1	50.000. 000	1	50.000. 000	DPMPTSP
2.18.01.2.0 8	8.Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase jasa penunjang yang terpenuhi sesuai SOP	Persentase jasa penunjang yang terpenuhi sesuai SOP	100	100	%	100	3.159.6 57.824	100	2.222. 940.72 4	100	2.222.9 40.124	100	2.222.9 40.724	100	2.222.9 40.724	100	2.750.0 00.000	100	2.750.0 00.000	DPMPTSP
2.18.01.2.0 8. 0002	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4	4	Laporan	4	688.940 .724	4	688.94 0.724	4	688.94 0.124	4	688.94 0.724	4	688.94 0.724	4	850.00 0.000	4	850.00 0.000	DPMPTSP
2.18.01.2.0 8. 0003	- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	4	Laporan	4	265.000 .000	4	265.00 0.000	4	265.00 0.000	4	265.00 0.000	4	265.00 0.000	4	100.00 0.000	4	100.00 0.000	DPMPTSP
2.18.01.2.0 8. 0004	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4	4	Laporan	4	2.205.7 17.100	4	1.269. 000.00 0	4	1.269.0 00.000	4	1.269.0 00.000	4	1.269.0 00.000	4	1.800.0 00.000	4	1.800.0 00.000	DPMPTSP
2.18.01.2.0 9	9. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan		Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	75	80	%	85	1.420.00 0.000	86	700.000 .000	87	700.000. 000	88	700.000. 000	89	700.000 .000	90	775.000 .000	90	775.000 .000	DPMPTSP

Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Outcome (Hanya untuk Program)	Indikator	Formulasi	Kondisi Awal		Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir		Perangk at Daerah
								2025		2026		2027		2028		2029		2030				
					2023	2024		Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4		4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Pemerintahan Daerah		Daerah dalam kondisi baik	Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik																		
2.18.01.2.0 9. 0001	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8	8	Unit	7	200.000.000	8	150.000.000	8	150.000.000	8	150.000.000	8	150.000.000	8	150.000.000	8	150.000.000	DPMPTSP
2.18.01.2.0 9. 0002	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7	7	Unit	5	200.000.000	5	150.000.000	5	150.000.000	5	150.000.000	5	150.000.000	5	125.000.000	5	125.000.000	DPMPTSP
2.18.01.2.0 9. 0005	- Pemeliharaan Mebel		Jumlah Mebel yang Dipelihara	Jumlah Mebel yang Dipelihara	2	2	Unit	2	120.000.000	5	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	DPMPTSP
2.18.01.2.0 9. 0006	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5	5	Unit	5	250.000.000	5	150.000.000	5	150.000.000	5	150.000.000	5	150.000.000	5	100.000.000	5	100.000.000	DPMPTSP
2.18.01.2.0 9. 0007	- Pemeliharaan Aset tetap lainnya		Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	0	0	Unit	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	1	100.000.000	1	100.000.000	DPMPTSP
2.18.01.2.0 9. 0009	- Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1	Gedung	1	650.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	DPMPTSP
2.18.01.2.0 9. 0010	- Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	0	Unit	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	1	50.000.000	1	50.000.000	DPMPTSP
2.18.01.2.0 9. 0011	- Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	0	Unit	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	1	50.000.000	1	50.000.000	DPMPTSP
TOTAL									27.996.272.871		20.839.420.481		24.337.716.000		24.623.223.700		25.069.054.100		25.582.076.250			

LAMPIRAN VI

BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SAMARINDA TAHUN 2025-2029

Indikator Kinerja Utama												
No	Indikator	Formulasi	Baseline		Satuan	Target Tahun						Keterangan
			2023	2024		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODALS												
1	Persentase Peningkatan Investasi	(Jumlah investasi tahun n dikurangi dengan jumlah investasi tahun n-1) dibagi dengan jumlah investasi tahun n-1 dikali 100%"	86,7	-1,65	%	12,86	16,67	7,14	5,56	5,26	4,00	Realisasi Investasi Berdasarkan Press Release Kementerian Investasi/ BKPM-RI

Indikator Kinerja Kunci												
No	Indikator	Formulasi	Baseline		Satuan	Target Tahun						Keterangan
			2023	2024		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL												
1	Realisasi Total Terhadap Target Investasi	Jumlah Realisasi Investasi Total terhadap Target Investasi	154,45	106,33	%	100	100	100	100	100	100	-
2	Persentase Peningkatan Investor yang berinvestasi	Jumlah Investor Saat Ini dikurang Jumlah Investor Sebelumnya dibagi Jumlah Investor Sebelumnya dikali 100 %	5	7	%	10	15	20	25	30	35	-
3	Persentase Pelaku Usaha yang memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	Jumlah Keseluruhan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dibagi Jumlah Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang Sesuai ketentuan di kali 100 %	60	65	%	70	75	80	85	90	95	-
4	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha	Jumlah Permasalahan yang diselesaikan dibagi jumlah total permasalahan yang dilaporkan dikali 100 %	100	100	%	100	100	100	100	100	100	-
5	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	Jumlah Data/Informasi yang dimanfaatkan dibagi jumlah Data Informasi yang tersedia dikali 100 %	50	55	%	60	65	70	75	80	85	-
6	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Hasil Perhitungan Komponen Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan, dan Evaluasi Kinerja sesuai Permenpan RB No 88 Tahun 2021 dan Perwali Samarinda No 11 Tahun 2024	78,00	79,00	Nilai	81	82	82	82.5	83	83.5	-
7	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 14 Tahun 2017 dan Peraturan Walikota Samarinda No. 28 Tahun 2018	86,00	92,00	Indeks	92.5	93	93.25	93.5	93.75	94	-

BERITA ACARA
HASIL VERIFIKASI RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
TAHUN 2025-2029

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Enam Belas** bulan **September** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima**, bertempat di **Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kota Samarinda** telah dilaksanakan verifikasi terhadap Rancangan Akhir Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025-2029 yang dihadiri oleh unsur Bapperida, unsur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana tercantum pada daftar hadir peserta dalam Lampiran I Berita Acara ini.

Setelah mendengar dan memperhatikan :

- 1) Penyampaian materi substansi Rancangan Akhir Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025-2029, yang disampaikan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (atau yang mewakili);
- 2) Penyampaian saran, tanggapan, dan koreksi dari Tim Pembahas yang terdiri dari unsur BAPPERIDA atas Rancangan Akhir Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025-2029;

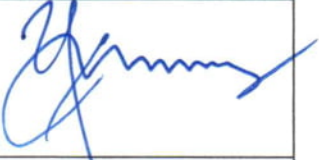
Seluruh peserta,

MENYEPAKATI

- | | |
|---------|--|
| Kesatu | : Rumusan Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II berita acara ini; |
| Kedua | : Rumusan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III berita acara ini; |
| Ketiga | : Kesesuaian RPJMD dengan RENSTRA sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV berita acara ini; |
| Keempat | : Rumusan Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan (termasuk indikator kinerja, target kinerja, dan pagu indikatif) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V berita acara ini; |
| Kelima | : Rumusan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang menjadi kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI berita acara ini; |
| Keenam | : Rumusan yang tercantum dalam Lampiran II, III, IV, V, dan VI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini untuk dijadikan sebagai bahan penyempurnaan Rancangan Akhir Renstra PD Tahun 2025-2029; |

Demikian Berita Acara hasil verifikasi Rancangan Akhir Renstra PD Tahun 2025-2029 ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mewakili unsur peserta forum,

NO	NAMA	INSTANSI	TANDA TANGAN
1	Dr. Riduansah, SE, M.Si NIP 197504212006041017	Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2	Wahyuni Nadjar, ST, MT NIP 197806082006042031	Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan (PSIW BAPPERIDA Kota Samarinda	

LAMPIRAN II

BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SAMARINDA TAHUN 2025-2029

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
-1	-2	-3	-4
1	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal		
	Belum optimalnya Realisasi Investasi di Kota Samarinda	1 Masih rendahnya Minat Investor untuk berinvestasi di Kota Samarinda	1 Belum adanya Profil Investasi Daerah yang menarik minat Investasi. 2 Kurangnya Keikutsertaan dalam Forum Promosi Investasi dalam skala Nasional dan Internasional 3 Belum Terintegrasinya secara penuh seluruh Layanan OPD Teknis Terkait Dalam Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP). 4 Masih Rendahnya Kesadaran Pelaku Usaha untuk melaporkan Kegiatan Penanaman Modal di Kota Samarinda 5 Belum adanya Konektivitas Antar Sistem Pelayanan Digital yang dimiliki oleh DPMPTSP dengan OPD Teknis Terkait dan Instansi Vertikal

ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

1. Iklim Investasi yang Kondusif.

LAMPIRAN III**BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA SAMARINDA TAHUN 2025-2029**

Tujuan (1)	Sasaran (2)	Strategi (3)	Arah Kebijakan (4)
Meningkatkan Investasi Daerah	Meningkatkan Capaian Investasi	Peningkatan Kebijakan Penanaman Modal dengan menciptakan iklim Investasi yang kondusif dan dapat menarik minat investor	Memberikan Kemudahan bidang Penanaman Modal dan Percepatan Berusaha

**BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA SAMARINDAS TAHUN 2025-2029**

[illegible]

Nomenklatur Program	Indikator	Kondisi Awal 2023	Kondisi Awal 2024	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Target 2030
	Membuka Usaha								
RENSTRA									
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
RPJMD									
Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	50,00%	55,00%	60,00%	65,00%	70,00%	75,00%	80,00%	85,00%
RENSTRA									
Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	50,00%	55,00%	60,00%	65,00%	70,00%	75,00%	80,00%	85,00%

Catatan terhadap kesesuaian Program RPJMD dengan Program RENSTRA :

**KESELARASAN PROGRAM KEPALA DAERAH DENGAN PROGRAM PRIORITAS
DAERAH**

Program Unggulan Kepala Daerah	Nomenklatur Program RENSTRA
Melanjutkan dan menuntaskan PROBEBAYA sebagai program pemberdayaan warga Kota Samarinda berbasis lingkungan RT	-
Melanjutkan Pembangunan Sekolah Terpadu bertaraf Internasional	-
Melanjutkan dan menuntaskan Program Penanggulangan Masalah Sosial melalui Perlindungan Sosial	-
Melanjutkan dan menuntaskan Badan Usaha Milik Rukun Tetangga (RT)	-
Melanjutkan Pembangunan Penataan Tepian Sungai serta ruang publik berbasis kewilayahan	-
Melanjutkan dan meningkatkan program pengendalian banjir	-

Catatan terhadap keselarasan program unggulan Kepala Daerah dengan Program RENSTRA PD :

LAMPIRAN V

BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SAMARINDA TAHUN 2025-2029

Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Outcome (Hanya untuk Program)	Indikator	Formulasi	Kondisi Awal		Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir		Perangk at Daerah
								2025		2026		2027		2028		2029		2030				
					2023	2024		Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4		4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																					
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL																					
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Meningkatnya Kemudahan Berinvestasi	Realisasi Total Terhadap Target Investasi	Persentase Realisasi Investasi di bagi Target Investasi di kali 100 %	154.45	106,33	%	100%	1.125.84 5.950	100%	950.000 .000	100%	971.850. 000	100%	985.625 .000	100%	999.423 .000	100%	1.025.0 00.000	100%	1.025.0 00.000	DPMPTSP
2 18 02 2.01	1. Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Pelaku Usaha Yang Menerima Fasilitas/ Insentif Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha Yang Menerima Fasilitas/ Insentif Kemudahan Penanaman Modal	0	0	Pelaku Usaha	20	267.823. 800	25	-	25	321.850. 000	30	321.850 .000	30	300.000 .000	30	300.000 .000	30	300.000 .000	DPMPTSP
2 18 02 2.01 0001	1.1 Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal		Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	0	1	Peraturan Daerah	0	0	0	0	1	321.850. 000	1	321.850 .000	0	-	0	-	0	-	DPMPTSP
2 18 02 2.01 0003	1.2 Fasilitas Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota		Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	Jumlah Kesepakatan Kemitraan	0	2	Kese pakatan	2	90.407.0 00	0	0	0	0	0	0	1	150.000 .000	1	150.000 .000	1	150.000 .000	DPMPTSP
2 18 02 2.01 0004	1.2 Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi		Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya	Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang	0	2	Rekomen dasi	2	177.416. 800	0	0	0	0	0	0	1	150.000 .000	1	150.000 .000	1	150.000 .000	DPMPTSP

Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Outcome (Hanya untuk Program)	Indikator	Formulasi	Kondisi Awal		Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir		Perangk at Daerah
								2025		2026		2027		2028		2029		2030				
					2023	2024		Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4		4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko		diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	regulasinya diharmonisasi																		
2.18.02.2.02	2. Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota		Jumlah Proyek Investasi Yang Siap Ditawarkan	Jumlah Proyek Investasi Yang Siap Ditawarkan	1	1	Proyek Investasi	2	858.022.150	2	950.000.000	2	650.000.000	2	663.775.000	2	700.000.000	2	725.000.000	2	725.000.000	DPMPTSP
2.18.02.2.020001	2.1 Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	"Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota"	1	1	Perda	1	268.792.100	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	1	330.000.000	1	355.000.000	1	355.000.000	DPMPTSP
2.18.02.2.020003	2.2 Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)		Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi	Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi	0	0	daerah	1	273.938.300	1	300.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	DPMPTSP
2.18.02.2.020004	2.3 Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1	1	Dokumen	1	315.291.750	1	350.000.000	1	350.000.000	1	363.775.000	1	370.000.000	1	370.000.000	1	370.000.000	DPMPTSP
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Meningkatnya Jangkauan Promosi Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Investor yang berinvestasi	Jumlah Investor Saat Ini dikurang Jumlah Investor Sebelumnya dibagi Jumlah Investor Sebelumnya dikali 100 %	5	5	%	5	802.045.600	10	1.100.000.000	15	1.126.400.000	20	1.142.900.000	25	1.142.900.000	30	1.175.000.000	30	1.175.000.000	DPMPTSP
2.18.03.2.01	1. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Promosi yang diselenggarakan	Jumlah Event Promosi yang diikuti/diselenggarakan	4	4	Event	3	802.045.600	4	1.100.000.000	4	1.126.400.000	4	1.142.900.000	4	1.142.900.000	4	1.175.000.000	4	1.175.000.000	DPMPTSP
2.18.03.2.010002	1.1 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi	4	4	Dokumen	2	714.776.000	3	1.000.000.000	3	1.000.000.000	3	1.000.000.000	3	1.000.000.000	3	1.075.000.000	3	1.075.000.000	DPMPTSP
2.18.03.2.010003	1.2 Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	Jumlah Peraturan Daerah yang ditetapkan	0	-	Peraturan Daerah	1	87.269.600	1	100.000.000	1	126.400.000	1	142.900.000	1	142.900.000	1	100.000.000	1	100.000.000	DPMPTSP

Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Outcome (Hanya untuk Program)	Indikator	Formulasi	Kondisi Awal		Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir		Perang k at Daerah
								2025		2026		2027		2028		2029		2030				
					2023	2024		Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4		4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Meningkatnya Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin sesuai Ketentuan	Jumlah Keseluruhan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dibagi Jumlah Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang Sesuai ketentuan di kali 100 %	50	50	%	50	481.202.000	55	650.000.000	60	665.000.000	65	674.375.000	70	685.000.000	75	700.000.000	75	700.000.000	DPMPTSP
2.18.04.2.01	1. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Pelaku Usaha yang patuh terhadap kewajiban Perizinan Berusaha	Jumlah Pelaku usaha yang memenuhi kewajiban perizinan berusaha	2032	2212	Pelaku usaha	2700	481.202.000	2750	650.000.000	2800	665.000.000	2850	674.375.000	2900	685.000.000	3000	700.000.000	3000	700.000.000	DPMPTSP
2.18.04.2.01.0005	1.1 Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah		Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	0	0	Kegiatan	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	1	100.000.000	1	100.000.000	DPMPTSP
2.18.04.2.01.0006	1.2 Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik		Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan		5012	Pelaku Usaha	5400	244.301.000	5500	250.000.000	5600	265.000.000	5700	274.375.000	5800	285.000.000	6000	250.000.000	6000	250.000.000	DPMPTSP
2.18.04.2.01.0007	1.3 Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko		Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi Pengaduan	40	40	Pelaku Usaha	40	99.247.000	40	200.000.000	44	200.000.000	46	200.000.000	48	200.000.000	50	150.000.000	50	150.000.000	DPMPTSP
2.18.04.2.01.0008	1.4 Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang		Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang	250	255	Kegiatan Usaha	260	137.654.000	280	200.000.000	270	200.000.000	280	200.000.000	290	200.000.000	300	200.000.000	300	200.000.000	DPMPTSP

Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Outcome (Hanya untuk Program)	Indikator	Formulasi	Kondisi Awal		Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir		Perangk at Daerah
								2025		2026		2027		2028		2029		2030				
					2023	2024		Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4		4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	perizinan berusaha berbasis risiko		di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	Mendapat Pemantauan																		
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Terkendalin ya Pelaksanaa n Penanaman Modal	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha	Jumlah Permasalahan yang diselesaikan dibagi jumlah total permasalahan yang dilaporkan dikali 100 %	100	100	%	25	150.982.000	30	450.000.000	35	460.800.000	40	467.550.000	45	467.550.000	50	475.000.000	50	475.000.000	DPMPTSP
2.18.05.2.01	1. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Pelaku Usaha yang Melaporkan LKPM	Jumlah Pelaku Usaha yang Melaporkan LKPM	150	200	Pelaku Usaha	400	150.982.000	400	450.000.000	450	460.800.000	450	467.550.000	475	467.550.000	500	475.000.000	500	475.000.000	DPMPTSP
2.18.05.2.01.0004	1.1 Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya		Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan	50	50	Kegiatan Usaha	50	47.360.000	50	100.000.000	75	110.800.000	75	117.550.000	75	117.550.000	100	125.000.000	100	125.000.000	DPMPTSP
2.18.05.2.01.0005	1.2 Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha		Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Pelaku Usaha yang dibina	50	100	Pelaku Usaha	100	57.894.000	100	180.000.000	150	180.000.000	150	180.000.000	150	180.000.000	200	180.000.000	200	180.000.000	DPMPTSP
2.18.05.2.01.0006	1.3 Pengawasan Penanaman Modal		Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan	Jumlah Kegiatan Usaha yang diawasi	50	50	Kegiatan Usaha	100	45.728.000	100	170.000.000	150	170.000.000	150	170.000.000	150	170.000.000	200	170.000.000	200	170.000.000	DPMPTSP

Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Outcome (Hanya untuk Program)	Indikator	Formulasi	Kondisi Awal		Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir		Perangk at Daerah
								2025		2026		2027		2028		2029		2030				
					2023	2024		Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4		4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Pelaksanaan Perizinan Berusaha																			
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Meningkatnya Pemanfaatan dan Informasi Penanaman Modal	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	Jumlah Data/Informasi yang dimanfaatkan dibagi jumlah Data Informasi yang tersedia dikali 100 %	50	55	%	60	264.378.000	65	300.000.000	70	306.900.000	75	311.250.000	80	311.250.000	90	315.475.000	90	315.475.000	DPMPTSP
2.18.06.2.01	1. Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Sistem Informasi Penanaman Modal	Jumlah Pelayanan Online dibagi seluruh jumlah pelayanan dikali 100 %	5	5	%	5	264.378.000	15	300.000.000	25	306.900.000	50	311.250.000	75	311.250.000	100	315.475.000	100	315.475.000	DPMPTSP
2.18.06.2.01.0002	1.1 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik		Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Jumlah Data dan informasi yang dikelola, disajikan dan dimanfaatkan	5000	5000	Dokumen	5000	264.378.000	15	300.000.000	5200	306.900.000	5300	311.250.000	5400	311.250.000	5500	315.475.000	5500	315.475.000	DPMPTSP
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Meningkatnya Kelancaran Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Nilai Hasil Evaluasi (AKIP) Perangkat Daerah	Hasil Perhitungan Komponen Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan, dan Evaluasi Kinerja sesuai Permenpan RB No 88 Tahun 2021 dan Perwali Samarinda No 11 Tahun 2024	78	79	Skor	81,00	25.171.819.321	82,00	17.389.420.481	82,00	20.806.766.000	82,50	21.041.523.700	83,00	21.462.354.100	83,50	21.891.601.250	83,50	21.891.601.250	DPMPTSP
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 14 Tahun 2017 dan Peraturan Walikota Samarinda No. 28 Tahun 2018	91	92	Skor	92,50		93,00		93,25		93,50		93,75		94,00		94,00		

Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Outcome (Hanya untuk Program)	Indikator	Formulasi	Kondisi Awal		Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir		Perangk at Daerah
								2025		2026		2027		2028		2029		2030				
					2023	2024		Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4		4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2.18.01.2.0 1.	1. Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai SOP	Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai SOP	100	100	%	100	209.481.650	100	250.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000	DPMPTSP
2.18.01.2.0 1. 0001	- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7	7	Dokumen	7	76.517.000	7	75.000.000	7	75.000.000	7	75.000.000	7	75.000.000	7	75.000.000	7	75.000.000	DPMPTSP
2.18.01.2.0 1. 0006	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja	4	4	Laporan	4	37.208.000	4	75.000.000	4	75.000.000	4	75.000.000	4	75.000.000	4	75.000.000	4	75.000.000	DPMPTSP
2.18.01.2.0 1. 0007	- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	4	Laporan	4	50.000.000	4	50.000.000	4	50.000.000	4	50.000.000	4	50.000.000	4	50.000.000	4	50.000.000	DPMPTSP
2.18.01.2.0 1. 0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah	0	1	Berita Acara	1	45.756.650	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	DPMPTSP
2.18.01.2.0 2	2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang disusun dan dilaporkan secara tepat waktu	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang disusun dan dilaporkan secara tepat waktu	100	100	%	100	18.737.690.347	100	13.077.030.391	100	16.494.376.510	100	16.729.133.610	100	17.149.964.010	100	16.696.364.010	100	16.696.364.010	DPMPTSP
2.18.01.2.0 2. 0001	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	74	74	orang	78	17.383.544.020	78	11.672.884.064	78	15.090.230.183	78	15.324.987.283	78	15.745.817.683	78	15.745.817.683	78	15.745.817.683	DPMPTSP
2.18.01.2.0 2. 0002	- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi	4	4	Dokumen	4	1.354.146.327	4	1.354.146.327	4	1.354.146.327	4	1.354.146.327	4	1.354.146.327	4	900.546.327	4	900.546.327	DPMPTSP

Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Outcome (Hanya untuk Program)	Indikator	Formulasi	Kondisi Awal		Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir		Perangk at Daerah
								2025		2026		2027		2028		2029		2030				
					2023	2024		Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4		4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2.18.01.2.0 6.0005	- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3	3	Paket	5	549.000.000	2	150.000.000	5	150.000.000	3	150.000.000	3	150.000.000	3	150.000.000	3	150.000.000	DPMPTSP
2.18.01.2.0 6.0006	- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan yang Disediakan	2	2	Dokumen	1	35.000.000	2	35.000.000	2	35.000.000	2	35.000.000	2	35.000.000	2	35.000.000	2	35.000.000	DPMPTSP
2.18.01.2.0 6.0008	- Fasilitas Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	8	Laporan	8	80.000.000	10	80.000.000	10	80.000.000	10	80.000.000	10	80.000.000	10	80.000.000	10	80.000.000	DPMPTSP
2.18.01.2.0 6.0009	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10	8	Laporan	7	177.389.500	6	149.449.366	6	149.449.366	6	149.449.366	6	149.449.366	6	149.449.366	6	149.449.366	DPMPTSP
2.18.01.2.0 7	7.Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Tingkat pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang	Tingkat pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang	55	60	%	65	258.600.000	70	330.000.000	75	330.000.000	80	330.000.000	85	330.000.000	90	510.787.874	90	510.787.874	DPMPTSP
2.18.01.2.0 7.0001	- Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1	1	Unit	1	50.000.000	1	130.000.000	1	130.000.000	1	130.000.000	1	130.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	DPMPTSP
2.18.01.2.0 7.0002	- Pengadaan Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0	0	Unit	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	1	100.000.000	1	100.000.000	DPMPTSP
2.18.01.2.0 7.0005	- Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2	2	Paket	2	100.000.000	5	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	1	60.787.874	1	60.787.874	DPMPTSP
2.18.01.2.0 7.0006	- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2	2	Unit	2	108.600.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	DPMPTSP
2.18.01.2.0 7.0007	- Pengadaan Aset Tetap Lainnya		Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	0	0	Unit	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	1	50.000.000	1	50.000.000	DPMPTSP

[illegible]

Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Outcome (Hanya untuk Program)	Indikator	Formulasi	Kondisi Awal		Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir		Perangk at Daerah
								2025		2026		2027		2028		2029		2030				
					2023	2024		Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4		4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2.18.01.2.0 9.0002	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7	7	Unit	5	200.000.000	5	150.000.000	5	150.000.000	5	150.000.000	5	150.000.000	5	125.000.000	5	125.000.000	DPMPTSP
2.18.01.2.0 9.0005	- Pemeliharaan Mebel		Jumlah Mebel yang Dipelihara	Jumlah Mebel yang Dipelihara	2	2	Unit	2	120.000.000	5	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	DPMPTSP
2.18.01.2.0 9.0006	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5	5	Unit	5	250.000.000	5	150.000.000	5	150.000.000	5	150.000.000	5	150.000.000	5	100.000.000	5	100.000.000	DPMPTSP
2.18.01.2.0 9.0007	- Pemeliharaan Aset tetap lainnya		Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	0	0	Unit	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	1	100.000.000	1	100.000.000	DPMPTSP
2.18.01.2.0 9.0009	- Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1	Gedung	1	650.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	DPMPTSP
2.18.01.2.0 9.0010	- Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	0	Unit	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	1	50.000.000	1	50.000.000	DPMPTSP
2.18.01.2.0 9.0011	- Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	0	Unit	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	1	50.000.000	1	50.000.000	DPMPTSP
TOTAL									27.996.272.871		20.839.420.481		24.337.716.000		24.623.223.700		25.069.054.100		25.582.076.250			

LAMPIRAN VI

BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SAMARINDA TAHUN 2025-2029

Indikator Kinerja Utama

No	Indikator	Formulasi	Baseline		Satuan	Target Tahun						Keterangan
			2023	2024		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODALS												
1	Persentase Peningkatan Investasi	(Jumlah investasi tahun n dikurangi dengan jumlah investasi tahun n-1) dibagi dengan jumlah investasi tahun n-1 dikali 100%"	86,7	-1,65	%	12,86	16,67	7,14	5,56	5,26	4,00	Realisasi Investasi Berdasarkan Press Release Kementerian Investasi/ BKPM-RI

Indikator Kinerja Kunci

No	Indikator	Formulasi	Baseline		Satuan	Target Tahun						Keterangan
			2023	2024		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL												
1	Realisasi Total Terhadap Target Investasi	Jumlah Realisasi Investasi Total terhadap Target Investasi	154,45	106,33	%	100	100	100	100	100	100	-
2	Persentase Peningkatan Investor yang berinvestasi	Jumlah Investor Saat Ini dikurang Jumlah Investor Sebelumnya dibagi Jumlah Investor Sebelumnya dikali 100 %	5	7	%	10	15	20	25	30	35	-

3	Persentase Pelaku Usaha yang memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	Jumlah Keseluruhan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dibagi Jumlah Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang Sesuai ketentuan di kali 100 %	60	65	%	70	75	80	85	90	95	-
4	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha	Jumlah Permasalahan yang diselesaikan dibagi jumlah total permasalahan yang dilaporkan dikali 100 %	100	100	%	100	100	100	100	100	100	-
5	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	Jumlah Data/Informasi yang dimanfaatkan dibagi jumlah Data Informasi yang tersedia dikali 100 %	50	55	%	60	65	70	75	80	85	-
6	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Hasil Perhitungan Komponen Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan, dan Evaluasi Kinerja sesuai Permenpan RB No 88 Tahun 2021 dan Perwali Samarinda No 11 Tahun 2024	78,00	79,00	Nilai	81	82	82	82.5	83	83.5	-
7	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 14 Tahun 2017 dan Peraturan Walikota Samarinda No. 28 Tahun 2018	86,00	92,00	Indeks	92.5	93	93.25	93.5	93.75	94	-

**KESIMPULAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI
TERHADAP KEBIJAKAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA SAMARINDA TAHUN 2025-2029**

No	Aspek	Penjelasan Hasil Pengendalian dan Evaluasi
(1)	(2)	(3)
1.	Perumusan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah selaras dengan Tujuan dan Sasaran pembangunan jangka menengah daerah	Sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah
2.	Perumusan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah berpedoman pada strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah	Strategi dan kebijakan Perangkat Daerah telah selaras dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD
3.	Perumusan rencana program, kegiatan, subkegiatan Perangkat Daerah berpedoman pada kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah	Sasaran Perangkat Daerah mendukung pencapaian sasaran RPJMD terutama yang ditetapkan sebagai sasaran utama pembangunan daerah
4.	Perumusan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah kabupaten/kota berpedoman pada indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah daerah	Sebagian besar Perangkat Daerah telah merumuskan indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif secara selaras dengan indikasi program prioritas dan kebutuhan pendanaan dalam RPJMD
5.	Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah berpedoman pada Tujuan dan Sasaran pembangunan jangka menengah daerah	Perangkat Daerah sebagian besar telah berpedoman pada tujuan dan sasaran RPJMD
6.	Pentahapan pelaksanaan program Perangkat Daerah sesuai dengan pentahapan pelaksanaan program pembangunan jangka menengah daerah	Hasil Pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa secara umum, pentahapan pelaksanaan program Perangkat Daerah telah sesuai dengan tahapan program dalam RPJMD

Samarinda, 16 September 2025

Mengetahui,
Kepala
BAPPERIDA Kota Samarinda

H. Ananta Fathurrozi, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda IV/c
NIP. 19681209 198803 1 004

Kepala Bidang PSIW
BAPPERIDA Kota Samarinda


Wahyuni Nadjar, ST, MT
Pembina IV/a
NIP. 19780608 200604 0 031

Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renstra Tahun 2025-2029
Perangkat Daerah : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Samarinda

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi				Keterangan
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak	
		Ada	Tidak Ada			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1.	Pembentukan tim penyusun Renstra Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja.	√				
2.	Penyiapan data dan informasi.	√				
3.	Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah	√				
4.	Review Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi	√				
5.	Penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota	√				
6.	Analisis terhadap Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai dengan pelayanan Perangkat Daerah kota	√				
7.	Perumusan isu-isu strategis	√				
8.	Perumusan visi dan misi Perangkat Daerah Kota	√				

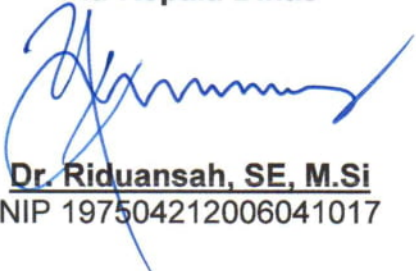
No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi				Keterangan
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak	
		Ada	Tidak Ada			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
9.	Perumusan visi dan misi Perangkat Daerah kota berpedoman pada visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah	√				
10.	Perumusan tujuan pelayanan jangka menengah Perangkat Daerah Kota	√				
11.	Perumusan sasaran pelayanan jangka menengah Perangkat Daerah Kota	√				
12.	Mempelajari Surat Edaran Wali kota perihal Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah kota beserta lampirannya yaitu rancangan awal RPJMD kota yang memuat indikator keluaran program dan pagu per-Perangkat Daerah	√				
13.	Perumusan strategi dan kebijakan jangka menengah Perangkat Daerah kota guna mencapai target kinerja program prioritas RPJMD kota yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah kota	√				

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi				Keterangan
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak	
		Ada	Tidak Ada			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
14.	Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun, termasuk lokasi kegiatan	√				
15.	Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah kota yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD kota	√				
16.	Pelaksanaan forum Perangkat Daerah kota	√				
17.	Perumusan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah kota berpedoman pada indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah	√				
18.	Perumusan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah kota	√				
19.	Pentahapan pelaksanaan program Perangkat Daerah kota sesuai dengan pentahapan pelaksanaan program pembangunan jangka menengah daerah kota	√				

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi				Keterangan
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak	
		Ada	Tidak Ada			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
20.	Dokumen Renstra Perangkat Daerah kota yang telah disahkan	√				

Samarinda, 16 September 2025

Plt. Kepala Dinas



Dr. Riduansah, SE, M.Si
NIP 197504212006041017

Petunjuk Pengisian Formulir

- Kolom (1) diisi dengan nomor urut kegiatan;
- Kolom (2) diisi dengan jenis kegiatan yang akan dievaluasi;
- Kolom (3) diisi dengan tanda cek (√) ya jika hasil pengendalian dan evaluasi ada kesesuaian pada pelaksanaan jenis kegiatan tersebut;
- Kolom (4) diisi dengan tanda cek (√) jika hasil pengendalian dan evaluasi tidak ada kesesuaian pada pelaksanaan jenis kegiatan tersebut;
- Kolom (5) diisi dengan keterangan dan penjelasan faktor penyebab ketidaksesuaian berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi; dan
- Kolom (6) diisi dengan keterangan dan penjelasan tindak lanjut penyempurnaan apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan pelaksanaan kegiatan.

Checklist Pengendalian dan Evaluasi terhadap Penyusunan Renstra
Perangkat Daerah : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Samarinda Tahun 2025-2029

RPJMD Kota	Renstra Perangkat Daerah	Kesesuaian/ Relevansi		Evaluasi	Tindak Lanjut	Hasil Tindak Lanjut
		Ya	Tidak			
Visi dan Misi RPJMD	Visi dan Misi RPJMD					
Tujuan dan Sasaran	Tujuan dan Sasaran					
Strategi dan Kebijakan	Strategi dan Kebijakan					
Penetapan Indikator Kinerja Daerah	Indikator Kinerja dan Sasaran Perangkat Daerah					
Indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan	Tujuan dan Sasaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan disertai kebutuhan dana indikatif					

SISTEMATIKA RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah disajikan dengan sistematika sebagai berikut (Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029):

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
Paling sedikit memuat:
 - a. Tugas, fungsi dan struktur Perangkat Daerah
 - b. Sumber daya Perangkat Daerah
 - c. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah (termasuk capaian SPM sesuai dengan tupoksinya)
 - d. Kelompok sasaran layanan (misalnya Bappeda, kelompok sasaran layanannya adalah Perangkat Daerah)

Catatan: dapat ditambahkan beberapa sub bab lainnya sesuai dengan kondisi daerah, seperti:

- a. Mitra Perangkat Daerah dalam pemberian pelayanan (apabila ada)
 - b. Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja Perangkat Daerah (apabila ada)
 - c. Kerjasama daerah yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah
- 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
Paling sedikit memuat:
 - a. Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah
 - b. Isu Strategis

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Paling sedikit memuat:

- 3.1 Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
- 3.2 Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
- 3.3 Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

3.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran
Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

**BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Paling sedikit memuat:

1. Uraian Program
2. Uraian Kegiatan
3. Uraian Sub Kegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif
4. Uraian Sub Kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah
5. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah
6. Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

INSPEKTORAT

Jalan Dahlia Nomor 9, Bugis, Samarinda Kota
Kota Samarinda, Kalimantan Timur Kode Pos 75121

Laman : inspektorat.samarindakota.go.id, Pos-el : inspektoratkotasmd@gmail.com

Catatan Hasil Reviu

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Samarinda Tahun Anggaran 2025-2029

Berdasarkan Surat Tugas Inspektorat Kota Samarinda Nomor: 800.1.11.1/1279/200, tanggal 28 Agustus 2025 perihal melakukan Reviu Rencana Strategis Tahun 2025-2029 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda, bersama ini kami sampaikan catatan hasil reviu sebagai berikut:

1. Keselarasan Program, Kegiatan dan Sub kegiatan dengan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah
Hasil reviu terhadap Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 menunjukkan bahwa program, kegiatan, dan subkegiatan telah selaras dan mendukung sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda.
2. Keselarasan Indikator Kinerja Perangkat Daerah dengan Bidang Urusan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Hasil reviu terhadap Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 menunjukkan bahwa Indikator IKU yang ditetapkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda telah selaras dengan tujuan dan sasaran RPJMD Kota Samarinda.
3. Konsistensi dan keterhubungan antara Program, Kegiatan, Sub kegiatan pada rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 dengan

program prioritas dan program perangkat daerah pada RPJMD tahun 2025-2029

Hasil reviu terhadap Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 menunjukkan bahwa konsistensi dan Keterhubungan Program Prioritas pada RPJMD dengan Program pada Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah telah sesuai. Program Prioritas pada bab III RPJMD yakni sebagai berikut :

- a) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
- b) Program Promosi Penanaman Modal
- c) Program Pelayanan Penanaman Modal
- d) Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang dilaksanakan dalam upaya penguatan perekonomian (Tematik pembangunan ekonomi)

4. Konsistensi dan Keselarasan Program Perangkat Daerah pada RPJMD dengan Program pada Rancangan Akhir Renstra DPMPTSP Kota Samarinda

Hasil reviu terhadap Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 menunjukkan bahwa Program pada Rancangan Akhir Renstra DPMPTSP Kota Samarinda telah selaras dengan program Perangkat Daerah yang terdapat pada Bab IV RPJMD.

5. Keselarasan Penetapan Target IKU dengan Pengendalian dan Evaluasi Hasil Capaian Periode Sebelumnya antara target kinerja rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dengan pengendalian dan evaluasi hasil capaian kinerja renstra Perangkat Daerah periode 2020-2024

a. Kesesuaian penetapan target IKU dengan Pengendalian dan Evaluasi tahun sebelumnya.

Hasil reviu terhadap keselarasan penetapan target IKU berdasarkan pada pengendalian dan evaluasi tahun sebelumnya menunjukkan bahwa penetapan target IKU berdasarkan tren lima tahun ke belakang

dan realisasi subkegiatan yang diinput ke e-Walidata. Penetapan target tidak menggunakan kertas kerja perhitungan target.

- b. Keselarasan penetapan target IKD dengan Dokumen Pengendalian dan Evaluasi tahun sebelumnya.

Hasil revidu menunjukkan bahwa penetapan target IKD berdasarkan berdasarkan tren lima tahun ke belakang dan telah memperhatikan capaian hasil pengendalian dan evaluasi periode sebelumnya yang diambil pada tahun 2024. Penetapan tidak menggunakan kertas kerja perhitungan target tetapi hanya berdasarkan tren lima tahun ke belakang.

6. Ketaatan dengan kaidah-kaidah perencanaan lainnya (Kesesuaian penetapan target sub kegiatan dengan data statistik sektoral daerah).

Hasil revidu menunjukkan bahwa penetapan target sub kegiatan belum sepenuhnya sesuai dengan data statistik sektoral daerah. Penetapan target dari beberapa sub kegiatan targetnya lebih rendah dari realisasi yang ada pada data statistik sektoral daerah.

Catatan Revidu	Rekomendasi
Penetapan target indikator subkegiatan pada Rancangan Akhir Renstra belum sepenuhnya berdasarkan Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD) tahun sebelumnya	Membuat kertas kerja perhitungan penetapan target indikator sub kegiatan berdasarkan Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD) tahun sebelumnya

7. Hal – hal yang perlu diperhatikan

- a. Memperhatikan proses penginputan pada Aplikasi SIPD agar sesuai dengan Rankhir Renstra tahun 2025-2029;
- b. Memperhatikan proses penetapan target dan penggunaan kertas kerja perhitungan pada subkegiatan agar sesuai dengan data statistik sektoral daerah;

- c. Memastikan bahwa dokumen Rankhir Renstra disusun dengan penulisan dan ejaan yang benar sesuai Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

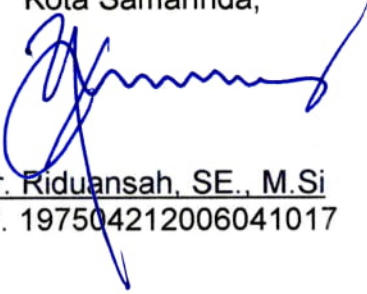
Tanggapan secara tertulis terhadap rekomendasi tersebut diatas Kami terima paling lambat 2 (dua) hari setelah penyampaian Catatan Hasil Reviu ini.

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Samarinda, 12 September 2025

Pengendali Teknis,

Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Samarinda,



Dr. Riduansah, SE., M.Si
NIP. 197504212006041017



Agus Salim, SE., MM
NIP. 19761129 201001 1002



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

INSPEKTORAT

Jl. Dahlia No. 9 RT.4 Kel. Bugis Samarinda
Samarinda (Kalimantan Timur) kode pos 75121
<https://inspektorat.samarindakota.go.id> Email: inspektoratktasmd@gmail.com

BERITA ACARA KESEPAKATAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL REVIU RENSTRA 2025-2029

Pada hari ini Rabu Tanggal **Sebelas** Bulan **September** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima**, Bertempat di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda, kami yang tersebut di bawah ini :

1. Nama : Agus Salim, SE., MM
NIP : 197611292010011002
Jabatan : Plt. Inspektur Pembantu Wilayah II Inspektorat Kota Samarinda
2. Nama : Dr. Riduansah, SE., M.Si
NIP : 197504212006041017
Jabatan : Sekretaris DPMPSTSP Kota Samarinda

Bahwa kedua belah pihak telah menyepakati pemenuhan tindak lanjut rekomendasi hasil kegiatan Reviu Rankhir Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda Tahun 2025-2029 dengan jumlah rekomendasi pada Catatan Hasil Reviu sebanyak 1 (satu) rekomendasi, yang mana atas rekomendasi tersebut akan ditindaklanjuti sebagaimana terlampir dan diserahkan ke Tim Reviu dalam waktu 2 (dua) hari/tanggal 16 September 2025 setelah Catatan Hasil Reviu diterima.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk menjadi perhatian serta dapat dilaksanakan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Samarinda, 11 September 2025

Plt. Irban Wilayah II

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
Kota Samarinda,


Dr. Riduansah, SE., M.Si
NIP. 197504212006041017


Agus Salim, SE., MM
NIP. 197611292010011002